



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG KOTA

Nomor : Kep/ /II/REN.4.1.6./2021

tentang

RENCANA KERJA
KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG KOTA TAHUN 2021 (REVISI)

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG KOTA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Renstra Polresta Malang Kota 2020-2024 maka perlu disusun Rancangan Rencana Kerja Polresta Malang Kota Tahun 2022, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
3. Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis (Sisrenstra) Polri;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU);
6. Skep Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Skep/572/XI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Draft Akhir Panduan Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Polri;
7. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Malang Kota Nomor : Kep/99/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Resor Kota Malang Kota Tahun 2020-2024;
8. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Malang Kota Nomor : Sprin/523/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 tentang Pokja penyusunan Rencana Kerja (Rarenja) Kepolisian Resor Kota Malang Kota Tahun 2021 (Revisi);
9. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polresta Malang Kota TA. 2020.

Memperhatikan

2 KEPUTUSAN KAPOLRESTA MALANG KOTA
NOMOR : KEP/ /II/REN.4.1.6./2021
TANGGAL : FEBRUARI 2021

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor :
Kep/1882/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Rencana
Strategis Polda Jatim tahun 2020 -2024;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024;
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Rencana Kerja Polresta Malang Kota Tahun 2021 sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini, berisi uraian kegiatan dan
anggaran Polresta Malang Kota Tahun 2021 serta acuan dalam
penyusunan Rancangan Rencana Kerja Polresta Malang Kota Tahun
2022;
2. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : Februari 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG KOTA

Dr. LEONARDUS SIMARMATA, S.Sos., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73050628

Kepada Yth :

1. Kapolda Jatim.
2. Irwasda Polda Jatim.
3. Karorena Polda Jatim.

Tembusan :

Para Kasub Satker.
jajaran Polresta Malang Kota.

DAFTAR ISI

Keputusan Kapolres Malang Kota Daftar Isi	<u>Halaman</u>
I. Latar Belakang	1
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan Masyarakat Kota Malang	3
b. Analisis SWOT	19
2. Identifikasi masalah	26
II. Tujuan dan Sasaran	32
3. VISI dan MISI	32
a. Visi dan Misi Polda Jatim.	32
b. Visi dan Misi Polresta Malang Kota.	32
4. Tujuan Jangka Menengah	33
a. Tujuan Polda Jatim.	33
b. Tujuan Polresta Malang Kota.	33
5. Sasaran Prioritas	33
a. Sasaran strategis Polda Jatim.	33
b. Sasaran strategis Polresta Malang Kota.	34
III. Arah Kebijakan	35
6. Kebijakan Polda Jatim	35
7. Kebijakan Polres Malang Kota	58
IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif	73
8. Program dan Kegiatan	73
9. Pagu Ideal	75
V. Penutup	77
10. Penutup.	77

Lampiran :

- Rencana Kerja Tahunan (RKT) Polres Malang Kota Tahun 2021;
- Rencana Kerja Kementrian Lembaga (Renja KL), Tahun 2021 (Formulir Aplikasi Renja-
KL 2021);
- Sprin Kapolresta Malang Kota tentang Panitia Penyusun Renja Tahun 2021.

**RENCANA KERJA
KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG KOTA
T.A. 2021 (REVISI)**

I LATAR BELAKANG.

1. Kondisi Umum.

Polres Kota Malang Kota sebagai salah satu pengemban fungsi pemerintahan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat , bertanggung jawab sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat baik keamanan dan ketertiban individu maupun umum khususnya di wilayah Kota Malang sebagaimana rumusan tugas pokok Polri dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 yaitu : Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakkan hukum.

Memasuki tahun 2021 intensitas gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polresta Malang Kota diperkirakan masih akan terjadi dan menunjukkan peningkatan yang mengusik rasa aman masyarakat terkait dengan aksi unras menentang kebijakan pemerintah, gejolak politik, dampak pandemi Covid-19 dan bentuk kejahatan konvensional , kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara maupun kejahatan yang berimplikasi kontijensi. Kejahatan konvensional merupakan implikasi dari tingginya tingkat pengangguran, rendahnya daya beli masyarakat, kesenjangan sosial dan berbagai dampak kondisi perekonomian negara akibat kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, fluktuasi harga minyak dunia serta pemanasan global yang berakibat pada cuaca yang ekstrem berdampak munculnya bencana alam, perubahan musim sehingga menghambat kelancaran pembangunan dan laju pertumbuhan perekonomian yang akhirnya bermuara pada tindakan penyimpangan / melanggar hukum.

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam penentuan pencapaian sasaran rencana strategis (Renstra) Polres Kota Malang Kota tahun 2020-2025 dalam mewujudkan *Strive For Excellence*, sesuai tahapan Grand strategi Polri tahun 2005-2025. Polres Kota Malang Kota sebagai salah satu lembaga pemerintah mempunyai kewajiban menyusun program pembangunan baik jangka menengah maupun program tahunan dengan mengacu pada program pemerintah pusat, daerah maupun kebijakan – kebijakan pimpinan.

Dihadapkan.....

Dihadapkan dengan tantangan tugas kedepan yang semakin kompleks diharapkan dapat membuat Polres Kota Malang Kota semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun Pemerintah baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Malang kepada Polres Kota Malang Kota untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang Kepolisian. Tantangan dan harapan tersebut sebagai berikut :

1. Polri yang profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian;
2. menggelar kekuatan Polri ditengah-tengah masyarakat dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan yang terjadi di masyarakat sehingga keberadaannya dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman;
3. menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana;
4. meningkatnya fungsi intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Kondisi umum yang melatar belakangi pelaksanaan tugas pokok Polres Kota Malang Kota tahun 2021 yang akan datang, setidaknya dapat ditinjau dari kondisi keamanan selama tahun 2020, dan kondisi Kamtibmas di wilayah Kota Malang sampai saat ini cukup kondusif yang bisa dilihat dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polri, konflik dan unjuk rasa walaupun masih marak namun cukup terkendali, ancaman terorisme masih cukup mengkhawatirkan sehingga harus tetap penuh kewaspadaan karena masih ditemukan sel-sel teroris diberbagai daerah dengan sistem rantai terputus, kerusuhan sewaktu – waktu bisa terjadi, terutama dari kelompok radikal dan Islam garis keras serta kelompok – kelompok masyarakat yang tidak puas atas kebijaksanaan pemerintah.

Pada permasalahan tertentu, potensi kerugian negara dan warga masyarakat Kota Malang akibat tindak kejahatan seperti korupsi, penipuan, kasus dokumen palsu untuk pengajuan kredit, pemalsuan surat BPKB, penyalahgunaan narkoba, 3 C (curas, curat dan curanmor), penganiayaan dalam rumah tangga (KDRT) dan kejahatan konvensional lainnya serta masalah sosial, unjuk rasa, pengungsian antara lain akibat bencana alam banjir, kemacetan lalu – lintas, pencemaran lingkungan, terjadinya banjir tahunan di wilayah Kota Malang masih memerlukan penanganan secara optimal.

Kondisi umum keamanan tersebut diatas dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain perkembangan aspek kehidupan masyarakat serta pengaruh lingkungan terhadap pelaksanaan tugas Polres Kota Malang Kota, baik lingkungan eksternal maupun internal, yang akan yang digambarkan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

a. Perkembangan aspek kehidupan.

Perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat di kota Malang selain disebabkan oleh berbagai kondisi juga karena adanya pengaruh yang terjadi pada lingkup nasional, regional maupun global. Untuk menyelesaikan permasalahan secara tepat dituntut mampu mendeteksi secara dini kerawanan-kerawanan yang mungkin timbul dan bersumber dari berbagai aspek kehidupan antara lain :

1) Geografi

a) Topografi

(1) Luas Wilayah.

Wilayah kota Malang seluas 110.06 Km² terletak pada ketinggian 440- 667 meter diatas permukaan air laut, secara astronomis terletak 112,06° hingga 112,07° bujur timur dan 7,06° hingga 8,02° lintang selatan, secara administrasi terdiri dari 5 kecamatan, 57 Kelurahan, 550 Rukun Warga (RW), 4226 Rukun Tetangga (RT).

(2) Batas Wilayah

- (a) Sebelah Utara : Wilayah Polsek Singosari dan Karang Ploso.
- (b) Sebelah Timur : Wilayah Polsek Pakis dan Tumpang.
- (c) Sebelah Barat : Wilayah Polsek Wagir dan Dau.
- (d) Sebelah Selatan : Wilayah Polsek Tajinan dan Pakisaji.

(3) Kota Malang juga dikelilingi gunung gunung antara lain :

- (a) Gunung Arjuno di sebelah utara.
- (b) Gunung Semeru di sebelah timur.
- (c) Gunung Kawi dan Gunung Panderman disebelah barat.
- (d) Daerah terendah di wilayah Kota Malang berada di Kecamatan Tlogowaru Kecamatan Kedung Kandang, sedangkan daerah tertinggi di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru.

- (4) Pegunungan yang berada di wilayah Kota Malang adalah pegunungan Buring yang terletak di kecamatan Kedung Kandang, dengan sungai yang mengalir yaitu :
- (a) Sungai Brantas melalui Kec. Blimbing, Kec. Kedungkandang, Kec. Klojen dan Kec Lowokwaru.
 - (b) Sungai Amprong di Kec. Kedungkandang.
 - (c) Sungai Bangau melalui Kec. Blimbing dan Kec. Kedungkandang
- (5) Berikut ini data Polsek yang masuk wilayah hukum Polres Kota Malang Kota:

NO	WILAYAH	LUAS WILAYAH (Km ²)	KET
1.	POLSEK KLOJEN	9,25	
	a. Kelurahan Bareng	1,07	
	b. Kelurahan Kasin	0,98	
	c. Kelurahan Sukoharjo	0,95	
	d. Kelurahan Kidul Dalem	0,49	
	e. Kelurahan Kauman	0,82	
	f. Kelurahan Gading Kasri	0,91	
	g. Kelurahan oro oro dowo	1,38	
	h. Kelurahan Klojen	0,81	
	i. Kelurahan Rampal	0,51	
	j. Kelurahan Samaan	0,53	
	k. Kelurahan Penanggungan	0,80	
2.	POLSEK BLIMBING	17,77	
	a. Kelurahan Balearjosari	1,52	
	b. Kelurahan Arjosari	1,16	
	c. Kelurahan Polowijen	1,35	
	d. Kelurahan Purwodadi	1,58	
	e. Kelurahan Blimbing	1,10	
	f. Kelurahan Pandanwangi	3,98	
	g. Kelurahan Purwantoro	2,29	
	h. Kelurahan Bunulrejo	1,84	
	i. Kelurahan Kesatrian	1,45	

NO	WILAYAH	LUAS WILAYAH (Km ²)	KET
	j. Kelurahan Polehan	1,01	
	k. Kelurahan Jodipan	0,49	
3.	KECAMATAN L. WARU	22,60	
	a. Kelurahan Lowokwaru	1,23	
	b. Kelurahan Tulusrejo	1,31	
	c. Kelurahan Jatimulyo	2,51	
	d. Kelurahan Mojolangu	2,88	
	e. Kelurahan Dinoyo	1,17	
	f. Kelurahan Sumbersari	1,28	
	g. Kelurahan Ketawanggede	0,83	
	h. Kelurahan Tlogomas	1,86	
	i. Kelurahan Tunjungsekar	1,87	
	j. Kelurahan Merjosari	3,36	
	k. Kelurahan Tunggulwulung	1,87	
	l. Kelurahan Tasikmadu	2,43	
4.	KECAMATAN KD. KANDANG	39,89	
	a. Kelurahan Kota Lama	0,86	
	b. Kelurahan Mergosono	0,56	
	c. Kelurahan Bumiayu	3,86	
	d. Kelurahan Wonokoyo	5,58	
	e. Kelurahan Buring	5,53	
	f. Kelurahan Kd. Kandang	4,94	
	g. Kelurahan Lesanpuro	3,73	
	h. Kelurahan Sawojajar	1,81	
	i. Kelurahan Madyopuro	3,49	
	j. Kelurahan Cemorokandang	2,80	
	k. Kelurahan Arjowinangun	2,87	
	l. Kelurahan Tlogowaru	3,86	
5.	KECAMATAN SUKUN	20,97	
	a. Kelurahan Kebonsari	1,57	
	b. Kelurahan Gadang	1,95	

NO	WILAYAH	LUAS WILAYAH (Km ²)	KET
	c. Kelurahan Ciptomulyo	0,83	
	d. Kelurahan Sukun	1,29	
	e. Kelurahan Bandungrejosari	2,75	
	f. Kelurahan Bakalan Krajan	1,78	
	g. Kelurahan Mulyorejo	2,75	
	h. Kelurahan Bandulan	2,24	
	i. Kelurahan Tanjungejo	0,93	
	j. Kelurahan Pisang Candi	1,84	
	k. Kelurahan Karang Besuki	3,04	

2) Demografi

- a) Data Jumlah penduduk dari hasil Registrasi pada tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan data dari Dispendukcapil kota Malang sebesar 874.890 jiwa dengan rincian laki – laki sebanyak 431.483 jiwa dan perempuan sebanyak 443.407 jiwa.

NO	KECAMATAN	JUMLAH		JML TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	KLOJEN	48.277	53.133	101.410
2.	BLIMBING	89.871	91.555	181.426
3.	LOWOKWARU	97.872	100.967	198.839
4.	KEDUNG KANDANG	97.650	98.648	196.298
5.	SUKUN	97.813	99.104	196.917
JUMLAH		431.483	443.407	874.890

- b). Kota Malang merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi di wilayah Jawa Timur yaitu sebesar 7.949 Jiwa / Km².

3) Iklim.

Kondisi Kota Malang rata-rata suhu udara berkisar antara 22,2°C-24,5°C, sedangkan suhu maksimum mencapai 32,3°C dan suhu minimal 17,8°C, rata-rata kelembaban udara berkisar 74% - 82%, dengan kelembaban maksimal 97% dan minimal 37%.

Seperti

Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim yaitu musim hujan dan musim kemarau, dan berdasarkan pengamatan stasiun klimatologi Karang Ploso curah hujan yang relatif tinggi pada bulan Januari, Pebruari, Maret, April dan Desember, sedangkan pada bulan Juni, Agustus, dan Nopember curah hujan relatif rendah, kecepatan angin maksimal terjadi pada bulan Mei, September dan Juli.

- 4) Sumber Daya Alam
 - a) Merupakan dataran tinggi dan berada ditengah yang dapat berfungsi sebagai distributor barang dan jasa.
 - b) udara yang cukup sejuk dan kering memungkinkan untuk dijadikan tempat istirahat, pemukiman, wisata, tempat pengembangan pendidikan dan latihan serta kegiatan lain seperti seminar, konferensi dsb.
 - c) dapat menopang dikembangkannya industri baik industri kecil, menengah maupun besar.
 - d) keadaan tanah yang subur, merupakan lahan yang cukup baik untuk daerah pertanian, walaupun akhir-akhir ini lahan pertanian mulai berkurang dengan digunakan keperluan lain non pertanian antara lain sarana perumahan, pendidikan, perdagangan, industri.
- 5) Aspek ideologi
 - a) Bangsa Indonesia sudah bertekad bahwa 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI) adalah harga mati bagi bangsa Indonesia, namun pada kenyataannya masih terdapat kelompok / individu yang ingin dan selalu berupaya menggantikan Ideologi Pancasila dengan Ideologi lain yang bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan membentuk organisasai massa atau Parpol dan melakukan berbagai kegiatan seperti seminar, dialog, lokakarya, aksi unras, kegiatan agama (pengajian) serta memasukkan jaringannya di lembaga eksekutif dan legislatif.
 - b) masih potensialnya kegiatan kelompok radikal untuk melakukan kegiatannya dalam rangka menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, khususnya mengembangkan kembali ajaran komunisme dan paham keagamaan tertentu seperti yang akhir-akhir ini terus menjadi sorotan dunia terkait dengan perkembangan paham ISIS yang ingin mendirikan kekhalifahan Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, walaupun dengan jalan aksi kekerasan/teror.
- 6) Aspek.....

6) Aspek Politik

- a) Pembangunan politik nasional diarahkan pada upaya melanjutkan reformasi di setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, namun pelaksanaannya masih diliputi euphoria reformasi demokrasi, telah mengancam integrasi bangsa yang eskalasinya diawali dengan pemaksaan kehendak / pendapat, tuntutan kepentingan, pembentukan opini dan provokasi melalui media massa, ketidak patuhan / pembangkangan yang radikalisme serta kecenderungan terjadinya *distrust* terhadap pemerintah/eksekutif, legislatif ataupun partai politik;
- b) Dengan sistem multipartai tidak ada kekuatan yang mayoritas, terbentuknya multipartai timbul karena adanya ambisi politisi untuk berebut posisi politik di lembaga legislatif, sehingga berpotensi terjadinya konflik antar parpol dan persaingan elit politik;
- c) Perkembangan politik nasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik global, yang menekankan prinsip-prinsip demokrasi, dan HAM telah memunculkan sistem ketatanegaraan baru yang ditandai oleh aspek-aspek yaitu : sistem multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial, cenderung melemahkan posisi eksekutif terhadap legislatif, sehingga berpotensi terjadi instabilitas politik. Presiden/Kada terpilih, bila tidak didukung mayoritas legislatif/DPR cenderung mendapat kontra dari kelompok oposisi, sehingga memperlambat pengambilan keputusan-keputusan dan pengambilan keputusan tidak mengedepankan azas musyawarah, melainkan menggunakan mayoritas melalui voting;
- d) Penerapan demokrasi masih diwarnai kepentingan kelompok / individu, di lembaga "Trias politica" (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang mementingkan kepentingan pribadi dan ego sektoral semakin kuatnya tekanan kelompok kepentingan politik tertentu dalam setiap penentuan kebijakan sehingga berpotensi terjadinya konflik sosial yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Kelompok kepentingan tersebut dapat bersumber dari parpol koalisi pemerintahan, non koalisi atau dari kelompok diluar sistem yang selalu mengkritisi kebijakan Pemerintah berdasarkan "Order" dari negara asing;

e) Institusi.....

- e) Institusi hukum dirasakan belum independent, profesional dan akuntable, serta kurang terbukanya sistem peradilan lembaga-lembaga hukum cenderung rawan komersialisme, intervensi saan politik atau kelompok penekan, sehingga tidak berpihak pada “supremasi hukum”.
- f) Pelaksanaan pemilu langsung dengan dipilih oleh rakyat telah menimbulkan biaya politik yang tinggi, maraknya budaya politik uang/political transaksional, sehingga memicu terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan kader parpol, baik yang menduduki jabatan di eksekutif maupun di badan legislatif, pada gilirannya menimbulkan krisis kader Parpol dan ketidakpercayaan masyarakat kepada kader parpol, pemerintah maupun legislatif yang kemudian timbul demokrasi jalanan atau untuk rasa.
- g) Ditetapkannya UU NO. 23 tahun 2014 tentang PEMDA dan UU NO. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang diharapkan dapat mempercepat sektor pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam prakteknya, disentralisasi dan otoda belum sepenuhnya didukung aturan pelaksanaan, sehingga timbul benturan kepentingan baik antara pusat dengan daerah maupun antar daerah, serta berdampak terhadap melemahnya pengawasan dan koordinasi Pemerintahan Propinsi terhadap penyelenggaraan kewenangan di Kabupaten/Kota.
- h) Peringatan hari-hari besar nasional maupun Internasional (hari korupsi, HAM, Buruh) dan kunjungan kerja Presiden RI atau Wakil Presiden RI, akan selalu dimanfaatkan kelompok/individu (LSM, BURUH, ORMAS, Organisasi Ekstra Mahasiswa, elit Parpol) melakukan aksi unras dengan mengangkat issue permasalahan sosial di masyarakat, terutama masalah buruh, kasus tanah, penggusuran bangunan liar, penanganan kasus korupsi, kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas dan masalah kebijakan pemerintah.
- i) Hubungan Politik Pusat dengan daerah telah menimbulkan permasalahan, yaitu perbedaan persepsi bahwa Kepala Daerah merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah atau Kepala Daerah sebagai wakil masyarakat yang dipilih melalui mekanisme parpol, atau terjadinya “ketidak loyalan” Kada terhadap Pemerintah Pusat atau Bupati/Wali kota kepada Gubernur, karena perbedaan Parpol pengusung;

j) Penafsiran.....

j) Penafsiran tentang demokrasi.

- (1) pelaksanaan kehidupan demokrasi semakin membaik termasuk dijaminnya kebebasan menyampaikan pendapat tetapi masih ada cara-cara penyampaian pendapat dengan demonstrasi yang berakhir dengan tindakan anarkhis;
- (2) euforia dalam berdemokrasi menimbulkan wacana untuk melaksanakan otonomi daerah secara berlebihan yang justru membahayakan keutuhan NKRI;
- (3) disisi lain potensi kerawanan dimungkinkan terjadi terkait adanya pro dan kontra atas kebijakan pemerintah pusat dalam menyikapi berbagai polemik yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri.

k) Perbedaan penafsiran tentang otonomi daerah.

Perbedaan penafsiran yang mengakibatkan perselisihan antara pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun pemerintah propinsi dengan pemerintah pusat yang menimbulkan friksi kewenangan, sehingga dapat terjadi konflik vertikal maupun horizontal.

7) Aspek Ekonomi :

a) Kemampuan daya saing.

Dengan adanya pasar bebas maka dimungkinkan semakin banyaknya produk-produk asing yang membanjiri pasar domestik di Kota Malang menimbulkan persaingan bidang perdagangan yang dapat memicu terjadinya tindak pidana di bidang ekonomi dan menyebabkan pabrik sampai pengusaha kecil pailit sehingga banyak PHK buruh/karyawan.

b) Sektor riil yang belum stabil.

Keadaan perekonomian global yang cenderung fluktuatif ditambah dengan adanya infrastruktur dan supra struktur ekonomi yang masih terjadi tarik menarik kepentingan pasar, antara pelaku tradisional dengan investor pasar modern (maraknya dibuka mini market), kenaikan tarif dasar listrik, penentuan kenaikan upah minimum regional (UMR), berdampak pada ketidakstabilan sektor dalam negeri yang memicu lonjakan harga sembako di pasaran dan makin tingginya tingkat pengangguran karena para pelaku usaha tidak mampu memproduksi, disisi lain intensitas calon tenaga kerja lulusan sekolah setiap tahun meningkat.

c) Peraturan.....

- c) Peraturan hukum di bidang ketenagakerjaan.

Perundang-undangan dibidang tenaga kerja yang relatif masih menjadi polemik karena dianggap belum menjamin sepenuhnya aspirasi buruh menimbulkan kerawanan di bidang perburuhan Kota Malang.

- d) Kepadatan arus lalu lintas jalur utama Pantura.

Kemacetan masih sering terjadi di dalam kota Malang sebagai imbas telah dibukanya pintu tol Malang Pandaan tanpa diimbangi dengan penambahan luas ruas jalan di dalam kota Malang yang sangat berpengaruh dengan terhambatnya sirkulasi angkutan bahan pokok maupun transportasi umum lainnya sehingga mempengaruhi kelancaran kegiatan aspek-aspek yang lain.

- e) pelemahan perekonomian global sangat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional, Indonesia menjadi salah satu negara memiliki daya pikat investasi memiliki pasar cukup luas dengan jumlah penduduknya sekitar 250 juta. kondisi ekonomi nasional saat ini begitu tertekan oleh perekonomian global, fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar AS tekanan dari ekonomi AS dan Tiongkok berdampak kepada Indonesia, hampir semua negara ASEAN mengalami tekanan pengaruh ekonomi global sendiri-sendiri, atau bergandeng tangan, rapatkan barisan, dan menahan tekanan bersama-sama. Negara-negara Eropa membuktikan penyatuan ekonomi kawasan penggunaan mata uang sama (Euro), bisa lebih kokoh menahan tekanan ekonomi global. Hal itu mestinya dilakukan juga oleh ASEAN.

- f) Bank Indonesia (BI) mengumumkan cadangan devisa berada di posisi US\$ 114,8 miliar pada akhir September atau turun US\$ 3,1 miliar dibandingkan posisi akhir Agustus yang sebesar US\$ 117,8 miliar. Cadangan devisa terus menipis seiring meningkatnya kebutuhan untuk stabilisasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Penurunan cadangan devisa terutama pada September 2018 dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

- g) Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, menekankan pentingnya membuka akses pasar untuk produk-produk Indonesia, membuka pasar-pasar baru belum tergarap optimal, menarik investasi asing di sektor-sektor prioritas sambil melindungi investasi Indonesia, mendorong kerja sama strategis dan komprehensif bilateral, memanfaatkan *ASEAN Economic Community* dan melakukan kerja sama peningkatan kapasitas dan triangular. Selain itu, meminta para diplomat meningkatkan diplomasi ekonomi. Kemlu menyiapkan *guidelines* kepada semua Kepala Perwakilan Indonesia di luar negeri meningkatkan diplomasi ekonomi. Perlu perubahan mindset para diplomat Indonesia lebih aktif dalam diplomasi ekonomi;
- 8) Aspek Sosial Budaya
- a) Dampak globalisasi.
- (1) Pergaulan bebas. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat khususnya dalam tata pergaulan;
- (2) Penyalahgunaan Narkoba. Kota Malang telah menjadi sasaran perdagangan Narkoba dan tidak tertutup kemungkinan menjadi tempat produksi;
- (3) Pengangguran. Tingginya angka pengangguran menimbulkan permasalahan dibidang sosial budaya, dengan maraknya premanisme, Gepeng, pengamen, dan penyakit masyarakat lainnya.
- b) Kesenjangan sosial.
- Kesenjangan sosial cenderung menimbulkan kerawanan Kamtibmas, memicu oknum masyarakat yang termarginalkan untuk bertindak melanggar hukum untuk mengimbangi kesenjangan yang ada.
- c) Kemajemukan adat istiadat, budaya, suku, ras, agama merupakan kekayaan bangsa dan potensi pembangunan nasional, juga merupakan potensi konflik apabila tidak dapat dikelola dengan baik dalam penanganannya oleh para stakeholder dalam mencari solusi-solusi yang dapat diterima oleh masing-masing pihak;

d) pengaruh.....

- d) pengaruh budaya asing/barat melalui media elektronik (media sosial/internet) yang menunjukkan kecenderungan sikap permisif, konsumtif dan individualis serta lemahnya regulasi dalam melakukan filterisasi terhadap pemberitaan memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan jati diri masyarakat seperti perilaku menyimpang dari norma sosial, norma agama dan norma hukum yang berimplikasi terhadap degradasi moral terutama generasi muda yang masih labil karena masa transisi pencarian jati diri dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (*Free Seks*, penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan fanatisme yang berlebihan terhadap suatu paham yang diperoleh dari kata "JIHAD dan Khilafah");
- e) berkembangnya berbagai ajaran/faham/aliran kepercayaan atau agama melalui teknologi informasi dan lemahnya fungsi pembinaan dan pengawasan dari jajaran Kemenag RI menimbulkan sikap pro kontra di dalam masyarakat, sehingga berpotensi terjadi konflik sosial, bahkan dapat menimbulkan konflik komunal);
- f) diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean pada Desember 2015, dihadapkan masalah ketenagakerjaan dengan kualitas yang rendah skill, masuknya tenaga kerja asing akan terjadi persaingan antara TKA dengan tenaga kerja lokal, disparitas upah yang jauh dan implikasi terhadap perubahan budaya yang dibawa oleh orang asing terhadap masyarakat.
- g) berkembangnya berbagai ajaran/faham/aliran kepercayaan atau agama melalui teknologi informasi yang mudah diakses dari berbagai situs aplikasi via internet apabila Pemerintah tidak mengambil langkah filterisasi terhadap pengaruh pemberitaan negatif maka hal tersebut dapat memicu potensi konflik internal ataupun antar umat beragama (intoleransi), terlebih gerakan ISIS yang menggunakan teknologi canggih dalam propagandanya mencari dukungan sebagai simpatisan dari mayoritas masyarakat Islam sehingga mempengaruhi mindset terhadap warga masyarakat untuk berperan aktif mendukung gerakan tersebut.
- h) kelompok radikal yang berafiliasi dengan JAT ataupun ISIS akan terus melakukan upaya penyebaran paham dan rekrutmen anggota secara terselubung yang dikemas dalam berbagai kegiatan keagamaan, apabila upaya deradikalisasi oleh Pemerintah dan pelibatan tokoh agama yang masih bersifat parsial maka tidak akan efektif dalam membentengi masyarakat dari pengaruh kelompok radikal tersebut;
 - i) kebijakan.....

- i) kebijakan pemerintahan terhadap pemberlakuan kurikulum pendidikan menimbulkan kebingungan terhadap peserta didik dan orangtua, demikian juga halnya sistem ujian nasional yang cenderung selalu berubah.
- j) perkembangan ISIS di Indonesia, khususnya di Jawa Timur semakin intensif dilakukan oleh kelompok JAT, hal ini terjadi karena Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang dapat menghentikan aktifitas kelompok radikal tersebut terkecuali melakukan tindak pidana umum ataupun terorisme.
- k) permasalahan ketenagakerjaan/hubungan industrial terkait masalah UMK Propinsi/Kab/Kota, permasalahan *Outsourcing*, PHK sepihak, banyaknya organisasi buruh yang berafiliasi ke Parpol sehingga memicu terjadinya aksi unras buruh dengan mendatangi Kantor/Lembaga Pemerintah, sweeping perusahaan lain dengan dalih aksi solidaritas, aksi tutup perusahaan, tutup Jalan, tuntutan secara hukum melalui Lembaga Perselisihan Perburuhan terutama di kawasan Surabaya Kota, Kab./Kota Mojokerto, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo dan Kab/Kota Pasuruan, kondisi tersebut telah dimanfaatkan oleh kelompok/individu tertentu untuk kepentingan politik ataupun untuk mata pencaharian (unras bayaran).
- l) kuantitas tenaga honorer baik guru tidak tetap dan paramedis yang belum diangkat sebagai PNS masih cukup tinggi, padahal tenaga honorer tersebut telah mengabdikan cukup lama dan usia semakin lanjut sehingga menimbulkan beban psikologis bagi honorer tersebut dan kesejahteraan yang kurang memadai sehingga membandingkan dengan buruh, apabila pemerintah tidak segera melakukan sertifikasi atau pengangkatan maka akan terus melakukan pressure kepada Pemerintah dengan melakukan aksi unjuk rasa atau mogok yang dapat berpengaruh terhadap dunia pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- m) kepedulian kepala daerah terhadap lembaga pendidikan dirasakan masih sangat kurang dikarenakan masih adanya infrastruktur lembaga pendidikan yang kurang memadai sehingga pada saat musim penghujan atau tekanan angin mengalami kerusakan yang dapat menimbulkan korban luka terhadap siswa atau tenaga pengajar;

n) dibidang.....

- n) dibidang kesehatan masih dihadapkan permasalahan disparitas pelayanan status kesehatan, pekerja medis/ paramedis berorientasi pada status ekonomi pasien bukan service oriented, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup higienis/bersih dan sehat, kurangnya pemerataan dan jangkauan pelayanan kesehatan, mutu dan ketersediaan obat. Pelaksanaan BPJS masih banyak ditemukan permasalahan terutama adanya diskriminasi terhadap pasien tidak mampu serta pelayanan BPJS belum tersistem dengan baik.
- 9) Aspek Agama
- a) Konflik internal agama.
- Timbulnya konflik internal berdasarkan keyakinan agama yang menyebabkan perusakan maupun pengusiran terhadap kelompok masyarakat seagama yang berbeda aliran.
- b) Konflik antar agama.
- Adanya oknum umat beragama tertentu yang berupaya mendiskreditkan agama lain dalam upaya menarik umat beragama lain untuk masuk dalam agama tertentu.
- c) Radikalisme.
- Radikalisme sebagai suatu pemahaman terhadap ajaran agama / ideologi tertentu yang memunculkan aksi nekad seperti bom bunuh diri dll yang merugikan banyak pihak dan mendiskreditkan agama tertentu.
- d) berbagai kegiatan Ormas keagamaan dan budaya yang sering melakukan aksi kekerasan mengatasnamakan agama ataupun pengamanan Swakarsa, dengan sasaran tempat hiburan dan tempat maksiat, bahkan sering berbenturan dengan Ormas lainnya.
- 10) Aspek Keamanan
- a) Konflik horizontal dan unjuk rasa.
- Terjadinya konflik horizontal yang diakibatkan dari adanya fanatisme agama yang sempit maupun etnisitas serta respons atas perlakuan tidak adil dari kebijakan pemerintah daerah/pusat, masalah ketenagakerjaan, pemenuhan upah minimum regional (UMR).

b) Tindak.....

b) Tindak pidana.

- (1) Jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan infrastuktur jalan, dan munculnya ranmor modifikasi seperti becak motor, dan kereta kelinci telah memicu terjadinya kepadatan lalu lintas terutama di jalan lintas utama dan dalam Kota yang berpotensi terjadi kemacetan serta meningkatnya laka lantas.
- (2) terjadi peningkatan kualitas kasus curas/curat, curanmor dengan menggunakan senpi/handak rakitan untuk menyerang korban dengan sasaran nasabah bank, SPBU, pengendara ranmor, ATM, toko emas untuk memenuhi kebutuhan hidup karena keterbatasan lapangan pekerjaan dan perubahan gaya hidup para pelaku serta tidak didukung oleh kemampuan atau keahlian lain atau tidak menutup kemungkinan terkait dengan aksi fa'i dari jaringan teroris untuk mendukung kegiatan operasional para pelaku teroris;
- (3) tahun 2020 terjadi peningkatan peredaran Narkoba di wilayah Kota Malang yang diselundupkan melalui berbagai cara, kondisi ini menunjukan bahwa di wilayah Kota Malang telah dijadikan pasar peredaran narkoba, sehingga pada tahun 2021 diperkirakan kasus narkoba semakin meningkat. Perdagangan manusia terutama kaum wanita remaja atau dibawah umur, perkelahian remaja/pelajar, kasus seksual akan mewarnai pada tahun 2021, kondisi ini sebagai dampak dari pengangguran dan pengaruh budaya asing;

c) Terorisme.

Eksistensi teroris ditunjukkan dengan menjadikan aparat kepolisian sebagai sasaran teror akan terus berlanjut selama berbagai kesenjangan yang memicu ketidakpuasan sosial belum terakomodasi secara proporsional, kewaspadaan harus tetap terjaga sebagai jaminan keamanan bagi petugas Kepolisian ketika berada di tengah-tengah masyarakat.

d) Pengamanan Kota Malang sebagai jalur lintas antar kota.

Padatnya lalu lintas jalur antar kota yang melewati Kota Malang memerlukan penanganan pengaturan tersendiri khususnya pada jam-jam padat karena dengan tersedianya jalan tol belum menyelesaikan permasalahan kemacetan karena masih kurang tertibnya masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya.

e) Bencana.....

e) Bencana Alam.

Makin seringnya terjadi bencana alam di beberapa daerah, tidak tertutup kemungkinan terjadi pula di Kota Malang terutama terkait aktivitas gunung Kelud, gunung Bromo maupun bencana lain sesuai karakteristik geografis Kota Malang seperti pohon tumbang, banjir, tanah longsor, dll.

f) kasus kriminalitas dan kecelakaan serta pelanggaran Lalu Lintas 2 (Dua) tahun terakhir terdata sebagai berikut :

No	Jenis Kejahatan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		L	S	%	L	S	%
I.	KEJAHATAN KONVESIONAL						
1.	PENCURIAN BERAT	25	10	0,4 %	55	22	40 %
2.	CURAS	1	0	0 %	8	11	137 %
3.	CURANMOR	109	32	0,29 %	378	48	13 %
4.	ANIAYA BERAT	0	0	0 %	3	1	33 %
5.	KEBAKARAN	0	0	0 %	27	27	100 %
6.	PEMBUNUHAN	0	0	0 %	2	2	100 %
7.	PEMERASAN/ANCAMAN	2	1	0,5 %	3	1	33 %
8.	PERKOSAAN	0	0	0 %	0	0	-
9.	PERJUDIAN	0	0	0%	8	8	100 %
10.	PEMALSUAN SURAT	0	0	0 %	6	2	33 %
11.	MERUSAK BARANG	1	0	0 %	9	10	111 %
12.	PENCULIKAN	0	0	0 %	0	0	-
13.	PENIPUAN	19	6	0,32 %	97	15	15 %
14.	PENGGELAPAN	28	54	1,93%	59	23	39 %
15.	PEMBAKARAN	0	0	0 %	0	0	-
16.	SUMPAH PALSU	0	0	0 %	0	0	-
17.	PENGHINAAN	0	0	0 %	0	0	-
18.	ANIAYA RINGAN	20	6	0,3 %	52	21	40 %
19.	AKIBAT ORG LUKA RINGAN	0	0	0 %	0	0	-
20.	AKIBAT ORANG LUKA	0	0	0 %	0	0	-
21.	PENCURIAN RINGAN	58	18	0,3 %	13	5	38 %
22.	PENADAHAN	0	0	0 %	8	8	100 %
23.	PEMALSUAN MERK	0	0	0 %	0	0	-
24.	KEJAHATAN KUHP GOL. I	0	0	0 %	0	0	-
25.	KEJAHATAN KUHP GPL. II	0	0	0 %	0	0	-
26.	MENERIMA SUAP	0	0	0 %	0	0	-
27.	KESUSILAAN	0	0	0 %	1	0	-
28.	PENGANIAYAAN	7	2	0,3 %	0	0	-

No	Jenis Kejahatan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		L	S	%	L	S	%
29.	LAKA MENINGGAL DUNIA	0	0	0 %	10	10	100 %
30.	LAKA LUKA RINGAN	0	0	0 %	45	45	100 %
31.	UTANG PIUTANG	0	1	0 %	0	0	-
32.	LAIN-LAIN	233	157	0,5 %	501	254	51 %
II	KEJAHATAN TRANSNASIONAL						
33.	NARKOBA	307	307	100%	290	290	100%
34.	MONEY LAUNDRY	-	-	-	-	-	-
35.	TEROR	-	-	-	-	-	-
36.	PERD. BAYI & WANITA	-	-	-	-	-	-
37.	CYBER CRIME	-	-	-	-	-	-
38.	SELUNDUP SENPI	-	-	-	-	-	-
39.	TRANS EKONOMI	-	-	-	-	-	-
40.	PERAMPOKAN	-	-	-	-	-	-
III.	KEJAHATAN THD KEKAYAAN NEGARA						
41.	ILLEGAL LOGGING	-	-	-	-	-	-
42.	PENAMBANGAN	-	-	-	-	-	-
43.	KORUPSI	1	1	100%	1	-	-
44.	BBM	-	-	-	-	-	-
IV.	KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTIJENSI						
45.	SPARATIS	-	-	-	-	-	-
46.	KONFLIK ETNIS	-	-	-	-	-	-
65.	TRAFICKING	-	-	-	-	-	-
66.	KERUSUHAN MASSA	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.820	1.124	62%	1.576	803	51%

Penindakan Pelanggaran.

NO	URAIAN	PERIODE		KET
		2019	2020	
1.	Tilang	28.303	23.995	T 15,2%
2.	Penyelesaian	28.303	23.995	T 15,2%
3.	Jumlah denda	1.752.670.000	1.802.912.000	N 2,8%

Penanganan.....

Penanganan Laka Lantas.

NO	URAIAN	PERIODE		KET
		2019	2019	
1.	Jumlah Laka	172	123	T 28%
2.	Penyelesaian Laka	143	118	T 17%
3.	Prosentase selesai	82 %	96 %	14 %
4.	Korban :			
	- MD	34	33	T 3%
	- LB	1	-	T 100%
	- LR	213	136	T 36%
5.	Rugi Material.	202.700.000,-	90.300.000,-	T 55%

b. Analisa SWOT.

1) *Strengths* / Kekuatan.

- a) Jumlah personel Polresta Malang Kota dan jajaran pada awal tahun 2021 (bulan Januari) sebanyak 844 orang (767 Polri, 77 PNS) tergelar di Mapolresta Malang Kota, 530 personel Polres dan 5 Polsek jajaran 314 personel (rata-rata per Polsek memiliki kekuatan 63 orang) .
- b) Seiring dengan pemberdayaan peran Polsek sebagai garda terdepan pelayanan, kekuatan tersebut dapat lebih ditingkatkan sesuai dinamika operasional Kepolisian.
- c) sarana mobilitas untuk menunjang operasional Kepolisian relatif telah tercukupi baik tingkat Polsek maupun Polresta Malang Kota khususnya pada pengemban fungsi preemtif dan preventif, rata-rata Polsek jajaran Polresta Malang Kota telah dilengkapi dengan kendaraan bermotor Roda 2 dan Roda 4 termasuk 6 truck dan 2 bus pengangkut mobilitas personel Polresta Malang Kota.
- d) sarana komunikasi (Alkom) VHF maupun UHF telah tergelar di jajaran Polresta Malang Kota dengan penempatan repiter di Desa Selorejo Dau Kab. Malang.
- e) penataan piranti lunak sebagai pedoman, acuan dan landasan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian secara bertahap sudah dibenahi.

f) Meningkatnya.....

- f) Meningkatnya anggaran dari tahun ke tahun dan telah dapat memenuhi kebutuhan operasional Polresta Malang Kota terutama dalam kegiatan operasional dan pemenuhan alat-alat khusus dalam menunjang kegiatan/operasional Polresta Malang Kota.
 - g) Meningkatnya kemampuan fungsi operasional dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, khususnya penanganan kejahatan terhadap kekayaan negara (korupsi, illegal logging, illegal mining), kejahatan yang berimplikasi kontinjensi (kerusakan massa), kejahatan *transnational crime* (terorisme narkoba) dan kejahatan konvensional (jiwa, harta benda, dan kehormatan) sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Polresta Malang Kota.
 - h) Tunjangan kinerja/remunerasi kepada personel Polri Polresta Malang Kota sebagai dorongan, semangat untuk terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja.
- 2) *Weaknesses / Kelemahan.*
- a) masih belum memadainya rasio ideal personel dibandingkan 874.890 jiwa penduduk yang dilayani dengan rasio 1: 1.140 orang. Angka tersebut belum termasuk masyarakat non penduduk (penduduk musiman) yaitu para pegawai / karyawan di Kota Malang yang berdomisili di luar kota, maupun para mahasiswa kos yang berasal dari berbagai kota dan daerah di Indonesia.
 - b) kualitas SDM belum merata dalam mengimbangi modus operandi kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi, motivasi personel untuk maju relatif rendah serta sistem pengembangan kemampuan personel belum tertata baik (personel yang memiliki kejuruan / pelatihan fungsi $\pm 55 \%$).
 - c) masih belum terdukung sepenuhnya peralatan operasional khususnya sarana mobilitas dan peralatan khusus Kepolisian lainnya untuk penugasan satuan operasional represif.
 - d) Reformasi di bidang kultural belum menunjukkan kemajuan yang optimal terlihat dari masih ada anggota Polri yang menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri yang masih diskriminatif, arogan dan masih dipungut biaya di luar ketentuan bila berurusan dengan Polri.

e) dalam.....

- e) dalam rangka operasional dan kodal ke jajaran, pejabat utama Polresta Malang Kota (Kabag, Kasat) dan para Kapolsek jajaran belum memiliki mobil dinas jabatan.
 - f) Anggaran Polri belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggaran prioritas Polri apalagi untuk pemenuhan anggaran ideal Polri sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja pegawai serta mendukung belanja barang guna kegiatan operasional Kepolisian, sedangkan untuk pemenuhan belanja modal masih kurang sehingga belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas dan materil yang dibutuhkan dalam pelayanan prima.
 - g) Minimnya jumlah dan kemampuan anggota di bidang IT, serta rendahnya kemauan anggota untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang IT dan masih terbatasnya penyidik Polresta Malang Kota yang berlatar belakang pendidikan S1/setara yang berkualitas dan memiliki kompetensi/kemampuan dalam menghadapi kejahatan *Trans Nasional, Cyber Crime, Money Loundring, Women's Trafficking, Illegal Fishing, Terrorism, Arm Smuggling, Drugs*.
 - h) Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan anggota Polri atau tindakan kontra produktif terhadap upaya membangun citra Polri.
 - i) Masih adanya penugasan personil yang tidak sesuai dengan kemampuan dan *skill* yang dimiliki sehingga dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan serta penegakan hukum belum memenuhi harapan masyarakat.
 - j) belum optimal peran serta masyarakat dalam kepatuhan hukum dan partisipasi terhadap tugas Polri (upaya perpolisian masyarakat).
- 3) *Opportunities / Peluang*.
- a) Sistem desentralisasi / otonomi daerah sebagai upaya pemerintah mendekatkan pelayanan pemerintah daerah (Pemkot) kepada masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesatuan Polri di kewilayahan (Polresta Malang Kota).
 - b) Pengelolaan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan nasional antara lain kondisi geografis, demografis dan sumber daya alam menjadi peluang dalam menunjang kepentingan nasional.

- c) Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) menyediakan peluang bagi Polresta Malang Kota untuk melanjutkan reformasi birokrasi baik dalam aspek struktural, instrumental, maupun kultural.
- d) Reformasi kultural yang telah menunjukkan kemajuan di Polresta Malang Kota dalam menghapus paradigma lama dalam melayani masyarakat. Sehingga, optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima dapat terus dilakukan melalui penggelaran personel dan peralatan Polri berbasis teknologi.
- e) Membenahi manajemen SDM guna peningkatan kapasitas dan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing.
- f) Peran Bidang Kehumasan dalam memberikan penerangan tentang agenda pembangunan kepada masyarakat melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat.
- g) Proses rekrutmen maupun pergeseran personel hasil Dikbang atau mutasi yang berkualitas sehingga tercipta postur Polri yang diharapkan guna memberikan sebaran pelayanan prima kepada masyarakat.
- h) Pemanfaatan teknologi berbasis e-manajemen dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana. Sehingga data bisa dilaporkan secara terpadu dan pimpinan bisa mengetahui hambatan yang dihadapi oleh masing masing penyidik.
- i) Cakupan layanan pengukuran indeks kepuasan masyarakat yang berpeluang untuk ditingkatkan.
- j) Hasil penilaian yang baik dari Mabes Polri dan Polda Jatim kepada Polresta Malang Kota adalah terwujudnya situasi aman dan sukses dalam setiap penggelaran pengamanan kegiatan/*event-event* baik yang berskala nasional maupun lokal di Kota Malang serta pengungkapan kasus Kriminalitas dan Narkoba.

- k) Laporan hasil penilaian atas kinerja maupun pertanggungjawaban penggunaan anggaran Polresta Malang Kota dan jajaran memperoleh tanpa adanya penyimpangan.
- l) Dukungan positif dari pemerintah daerah di Kota Malang berupa bantuan anggaran pengamanan Pilwali Kota Malang dan dukungan setiap adanya pelaksanaan kegiatan.
- m) Program terobosan kreatif (*creative breakthrough*) Polresta Malang Kota dan jajaran yang diterima dengan baik dan mendapat penilaian positif dari masyarakat: berupa Aplikasi Jogo Malang, Bakso Makota, SKCK *Online*, E-Tilang, E_SIM, Samsat *Online* dll. Polresta Malang Kota dan jajaran tidak henti-hentinya melakukan inovasi baru guna memberikan pelayanan prima yang exelent pelayanan terpadu Car Free Day.
- n) Hubungan yang telah terjalin dengan baik melalui wadah FORKOPIMDA (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Malang.
- o) Dukungan dan kepedulian seluruh lapisan masyarat Kota Malang sampai ditingkat Desa bersama sama dengan Polri dan TNI menjaga keamanan dan ketentraman.
- p) Sistem desentralisasi/otonomi daerah sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik Polri kepada masyarakat, sejalan dan saling menunjang dengan organisasi Polri yang ada pada semua tingkatan Pemerintahan.
- q) Tugas operasional Polri dalam menciptakan keamanan dalam negeri melalui strategi perpolisian masyarakat semakin meningkat, hal ini menjadi peluang bagi Polresta Malang Kota dalam membangun kepercayaan masyarakat (*Trust Building*) terhadap Polri;
- r) kultur asli masyarakat Kota Malang yang agamis dan hubungan antar umat beragama yang harmonis mampu meredam gejolak yang timbul.
- s) keberadaan Potensi Kamtibmas yang konsisten dibina Polresta Malang Kota antara lain supporter Aremania, Supeltas dan Kamling Udara.

4) *Threats / Ancaman :*

- a) tuntutan masyarakat atas peningkatan kualitas pelayanan Polri / Polresta Malang Kota, belum sepenuhnya terakomodasi dalam aplikasi pelaksanaan tugas setiap individu personel Polri.
- b) angka pelanggaran hukum dan indikator kriminalitas yang masih tinggi, mencakup empat golongan jenis kejahatan :
 - (1) kejahatan konvensional yang hampir merata di wilayah Polresta Malang Kota dan sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat khususnya kasus Curanmor, Curat dan Curas;
 - (2) kejahatan transnasional, khususnya penyalahgunaan Narkoba telah menimbulkan jumlah korban yang cukup banyak serta indikasi meningkatnya *cyber crime* dan *white collar crime* yang relatif mengganggu dinamika perekonomian Kota Malang;
 - (3) kejahatan terhadap kekayaan negara meliputi korupsi, penyelundupan dan perdagangan ilegal lainnya, posisi strategis Kota Malang dimanfaatkan sebagai jalur perlintasan;
 - (4) kejahatan yang berimplikasi kontinjensi khususnya terkait dengan SARA yang memiliki kecenderungan meningkat termasuk kegiatan unjuk rasa.
- c) Masuknya pengaruh budaya asing dalam kehidupan masyarakat mengakibatkan opini yang dibangun di media sosial untuk melemahkan pemerintah melalui isu politik, sosial, tenaga kerja asing dan penegakkan hukum digunakan untuk menyebarkan hoax dan kebencian yang mengganggu stabilitas dan keamanan nasional sesuai dengan dinamika kehidupan sosial masyarakat.
- d) Adanya dimensi baru dalam penyebaran kejahatan-kejahatan akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa dampak negatif seperti kejahatan siber. Dalam era virtual saat ini baik kejahatan terhadap sistem informasi (*computer crime*) maupun kejahatan lama yang akan lebih mudah dilakukan dengan teknologi informasi (*computer related crime*). Hal tersebut dapat berkontribusi negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, bahkan keamanan negara.

e) Konflik.....

- e) Konflik yang dapat muncul selama masa darurat yang terjadi karena wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19) antara lain upaya pemblokiran akses jalan sehingga menimbulkan keributan, seperti penjarahan, penodongan, pemalakan atau kriminalitas sejenisnya, yang berpotensi menghambat akses kendaraan logistik pangan dan medis.
- f) Meningkatnya kasus-kasus yang merugikan Negara, masyarakat/ individu diantaranya kasus korupsi, kasus narkoba dan *money laundering*, dikarenakan ringannya putusan hukuman terhadap terdakwa serta masih adanya putusan bebas murni.
- g) Tingkat kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak main hakim sendiri.
- h) Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih, sebagai upaya dalam pembaharuan hukum dan perundang-undangan mengakibatkan kerancuan dalam operasionalisasi penegakan hukum di lapangan, terutama menyangkut masalah kewenangan institusi yang berkompeten untuk menangani suatu permasalahan.
- i) Potensi gangguan keamanan masih sangat luas dari konflik-konflik yang timbul akibat dari kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, keanekaragaman suku, budaya dan agama, *euforia*, kebebasan menyampaikan pendapat, konflik kepentingan partai politik, jaringan perdagangan Napza (Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif); aliansi yang makin luas pada *white colour crime*, kejahatan terorganisir, dan penguasa informal yang menjadikan penegakan hukum makin kompleks.
- j) Kebijakan-kebijakan pemerintah setempat, yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, yang melahirkan aksi unjuk rasa yang berpotensi ditunggangi oleh kepentingan politik dari suatu golongan.

2. Identifikasi Masalah.

Pelaksanaan tugas Polresta Malang Kota seiring dengan perkembangan lingkungan strategi regional, nasional dan daerah akan semakin berat dan kompleks. Serta tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Polresta Malang Kota dan pelayanan di bidang Kepolisian oleh Polresta Malang yang semakin tinggi mengharuskan Polresta Malang Kota menyusun berbagai upaya dan langkah-langkah aksi yang konkret dan efektif dalam mewujudkan keamanan diwilayah Kota Malang.

Secara umum dengan mencermati berbagai permasalahan yang digambarkan dalam kondisi umum dan hasil analisis maka teridentifikasi beberapa permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polresta Malang Kota pada Tahun 2021, sebagai berikut :

a. Permasalahan bidang SDM.

- 1) penggelaran kekuatan jajaran Polresta Malang Kota seiring dengan meningkatnya tipologi dari Polres menjadi Polresta Malang Kota serta adanya perubahan struktur organisasi yang berlaku dari Perkap 23 Tahun 2010 menjadi Perkap 02 Tahun 2021 (namun belum ada Jukrah pelaksanaan), mengingat sampai saat ini belum ada penambahan personel dari satuan atas ke Polresta Malang Kota, sedangkan jumlah personel yang memasuki masa purna tugas sangat signifikan, hal ini tidak sebanding dengan tingginya volume kegiatan masyarakat dan pemerintah;
- 2) belum optimalnya pemahaman dan komitmen moral sebagai esensi program reformasi birokrasi Polri dari sebagian unsur pimpinan maupun anggota Polri yang terakumulasi dalam pelaksanaan kegiatan rutin seperti aktivitas preemtif dan represif sekedar rutinitas tanpa target, perubahan sikap dan perilaku dalam memberikan pelayanan;
- 3) masih kurang humanis dan sering membebani, mencerminkan bahwa profesionalisme Polri belum sesuai dengan harapan masyarakat dan kondisi tersebut berpotensi terjadinya complain dari masyarakat yang berdampak pada degradasi kepercayaan masyarakat;
- 4) terbatasnya jumlah personel Polresta Malang Kota yang berkualitas dan memiliki kompetensi / kemampuan sesuai bidang tugasnya dalam menghadapi kejahatan transnasional, menjadi salah satu faktor belum optimalnya ungkap kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi;
- 5) belum optimalnya hubungan dan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait akan menghambat terlaksananya hubungan yang sinergis dengan instansi vertikal maupun horizontal;

6) masih.....

- 6) Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi personel Polresta Malang Kota.
 - 7) Keterbatasan personel polisi dimana besaran ideal tentang rasio penduduk terhadap personel polisi tidak merata di seluruh wilayah kota Malang.
- b. Permasalahan bidang anggaran.
- 1) dukungan anggaran kegiatan turjawali Lantas dan turjawali Sabhara belum memadai untuk membiayai kegiatan operasional yang ada selama satu tahun anggaran, mengingat ajukan dalam pagu ideal sudah disesuaikan dengan jumlah personel dan jumlah yang ada, namun pada saat turun DIPA tidak sesuai pengajuan pada saat penyusunan pagu Ideal.
 - 2) terbatasnya dukungan anggaran untuk belanja modal pada program peningkatan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas Kepolisian khususnya peralatan penunjang seperti Laptop, komputer, printer, pembangunan gedung, kantor dan kendaraan dinas untuk pelayanan kepada masyarakat;
 - 3) dukungan kegiatan operasi kepolisian dalam rangka pelayanan kemanusiaan masih sangat terbatas dari alokasi yang di ajukan dalam pagu ideal, sehingga satker kesulitan dalam melaksanakan pemenuhan dukungan tersebut.
- c. Permasalahan bidang materil fasilitas dan jasa.
- 1) belum terpenuhinya rumah penyimpanan barang sitaan (Rupbasan), sehingga pengelolaan barang bukti selain rawan rusak maupun hilang juga upaya mengumumkan kepada masyarakat yang kehilangan belum terlaksana secara optimal;
 - 2) masih adanya 2 lahan Mako Polsek yang masih menumpang dilahan milik Pemkot, sedang proses pengajuan usulan penggantian lahan yang setiap tahun selalu diajukan dalam pengajuan anggaran, namun hingga saat ini belum bisa terealisasi;
 - 3) belum terdukungnya kendaraan operasional Satreskrim, Satresnarkoba dan Satintelkam sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan fungsi, kondisi tersebut berimplikasi pada kecenderungan anggota untuk memanfaatkan kendaraan BB untuk memenuhi kebutuhan sarana mobilitas;
 - 4) belum tersedianya rumah tahanan Polri (Rutan Polri), yang sesuai standard HAM serta rumah barang bukti dan sitaan negara (Rumbasan) yang layak;

d. Permasalahan.....

- d. Permasalahan bidang sistem dan metode
- 1) Trend tindak pidana dan modus operandi pelaku belum diimbangi dengan kompetensi penyidik / penyidik dalam penggunaan teknologi (IT) pada fungsi Reserse Kriminal dan Reserse Narkoba sehingga pengungkapan kasus melalui teknologi sangat rendah.
 - 2) percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polresta Malang Kota untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber dalam memberikan ketanggap segera atas respon pelayanan masyarakat (*quick respon*);
 - 3) semakin bertambah kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan yang berbeda;
 - 4) Pemanfaatan teknologi yang belum sepenuhnya optimal di Polresta Malang Kota masih dapat lebih digali dan dimanfaatkan lebih dalam.
 - 5) Belum terpenuhinya kebutuhan peralatan kebutuhan peralatan teknologi informasi.
 - 6) Masih kurangnya sinergi antara masyarakat dan Polri dalam memerangi dan membentengi Kota Malang dari ancaman berita hoaks.
- e. Permasalahan bidang Operasional
- 1) Pertumbuhan penduduk dunia yang telah mencapai 7.2 miliar jiwa. Penduduk Indonesia yang sangat heterogen terdiri dari berbagai macam Suku, Agama, dan Ras (SARA) tidak terkecuali penduduk di kota Malang. Komposisi penduduk di kota Malang yang multikultur dan multi agama menyimpan kerawanan konflik antar kelompok tersebut jika hubungan antar kelompok tersebut tidak dikelola dengan baik.
 - 2) Tantangan industrialisasi juga menjadi sesuatu yang harus sangat dipikirkan mengingat lahan yang tersisa semakin tipis.
 - 3) Paham ekstrimism yang cenderung intoleran terhadap kepercayaan orang lain dan sangat mendorong orang untuk ikut percaya terhadap apa yang dianut dapat bereskalasi menjadi Violent Ekstremism sehingga menjadi masalah ketika tidak didampingi kesigapan dalam mengatasi permasalahan yang muncul.
 - 4) Masih terdapat individu/kelompok yang memiliki ideologinya sendiri namun tidak merujuk pada dasar Negara yaitu Pancasila.
 - 5) Adanya individu/kelompok yang intoleran dalam menyikapi keanekaragaman budaya, adat istiadat, suku dan agama dapat memicu terjadinya konflik sosial dan bukan tidak mungkin dapat menjadi masalah Negara.
 - 6) Perkembangan.....

- 6) Perkembangan otonomi daerah, pemekaran wilayah, makin kritisnya masyarakat terhadap aktivitas sistem politik dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah, berakibat kepada status keamanan di suatu wilayah.
- 7) Struktur perekonomian secara spasial masih menghadapi ketimpangan ekonomi antar wilayah.
- 8) Perkembangan kondisi politik yang cukup pesat juga berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkannya.
- 9) Pandemi merupakan epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang. Pandemi Covid 19 ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global, berbagai penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya, hingga karantina/*lockdown* kota di dunia.
- 10) Masih adanya beberapa bhabinkamtibmas yang tidak memiliki peralatan yang lengkap.
- 11) Masih berlangsungnya 4 (empat) jenis kejahatan, yaitu kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi, memerlukan kemampuan Polresta Malang Kota untuk mengungkap dan menanggulangi.
- 12) Pesatnya teknologi informasi dan telekomunikasi turut mendukung munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang tidak diprediksi sebelumnya seperti penyebaran pornografi, pencemaran nama baik, penipuan dengan beraneka ragam modus operandi, atau perdagangan perempuan, baik melalui pesan singkat (*short message service/SMS*) maupun melalui jaringan internet.
- 13) Masih terjadinya gesekan/konflik antara Polresta Malang Kota dengan penegak hukum lainnya dikarenakan adanya ego sektoral yang dapat berakibat menurunnya kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
- 14) Pengguna aktif sosial media rentan menjadi korban atas kejahatan siber yakni kejahatan berdimensi baru (*New Dimension Crime*) dan telah turut mewarnai aksi-aksi kejahatan di Indonesia.
- 15) Kerawanan Penyalahgunaan Senpi dan Handak secara ilegal dan tidak menutup kemungkinan penyelundupan yang berasal dari luar negeri.
- 16) Keterbatasan dana operasional kendaraan patroli dan minimnya kesejahteraan anggota.

f. Eksternal.

- 1) Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa yang masih akan terjadi di tahun 2021 yang akan mengganggu stabilitas dan keamanan di wilayah Kota Malang;
- 2) Dibidang ideologi masih adanya kelompok yang berupaya memutarbalik ideologi seperti Igaras (Jamaah Anshorut Tauhid, HTI, NII, MMI, FPI, Syah, Al-Irsyad FOSI), kelompok potensial Igaras (LDII, Jamaah Tabligh, Arimatea, KAMMI), dan keberadaan kristen eksklusif "LPMI" yang mengajarkan faham bersifat ortodok / provokatif, memerlukan keberadaan personel Intelijen secara melekat agar mampu meredam dan menggalang kekuatan tersebut kembali berideologi Pancasila;
- 3) meningkatnya jumlah universitas dan penambahan fakultas di beberapa perguruan tinggi di Kota Malang menimbulkan pertambahan jumlah mahasiswa dari luar kota Malang, dibidang Kamtibcar Lantas berpotensi menimbulkan kemacetan di jalur jalan tertentu (volume kendaraan meningkat) disamping gangguan Kamtibmas lainnya yang menjadikan para mahasiswa sebagai obyek sasaran kejahatan (Curanmor, Curat, Curas, dll), sehingga aparat kepolisian harus lebih meningkatkan intensitas operasional fungsi preemtif, preventif dan penegakan hukum;
- 4) pertumbuhan tenaga kerja setiap tahun meningkat namun tidak diiringi dengan penambahan lapangan kerja yang memadai menjadikan angka pengangguran makin besar, karena tuntutan ekonomi berpotensi besar menjadi pelaku kejahatan, yang harus diantisipasi Polresta Malang Kota dengan meningkatkan kegiatan patroli dan penindakan secara profesional dan prosedural sebagai bentuk *shock therapy* bagi pelaku maupun calon pelaku agar mengurungkan niat jahatnya;
- 5) Volume kendaraan bermotor setiap tahun bertambah namun fasilitas jalan relatif tidak mengalami perubahan (statis) menimbulkan dampak kemacetan dan resiko kecelakaan yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, kondisi tersebut memerlukan penanganan lintas sektoral disamping diperlukan penambahan kekuatan dan intensitas kehadiran polisi di ruas-ruas jalan tertentu;
- 6) dampak negatif kemajuan teknologi informasi menjadi inspirasi bagi pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya sebagaimana tayangan informasi yang dilihat dan pemanfaatan teknologi dalam aksi kejahatan melahirkan modus kejahatan baru di Kota Malang, antisipasi yang harus dilakukan adalah mengoptimalkan peran Satreskrim dan Satresnarkoba melalui upaya penegakan hukum secara profesional dan penggelaran Kring Serse.
- 7). Proses.....

- 7) proses globalisasi dan kemajuan Iptek juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya yang perlu diantisipasi dengan penguatan Pancasila di tengah kehidupan masyarakat;
- 8) dampak ekonomi dari akibat adanya penyebaran *Covid-19* yang turut mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 9) peredaran Narkoba, kejahatan korupsi dan terorisme, kejahatan siber serta kejahatan konvensional semakin marak dan telah pada taraf yang meresahkan masyarakat;
- 10) masih tingginya konflik sosial, premanisme dan tindak kejahatan lain yang meresahkan masyarakat;
- 12) kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak yang masih belum dapat tertangani secara baik sesuai SPM dan perlu penanganan khusus;

II. TUJUAN DAN SASARAN.

1. Visi dan Misi

a. Visi dan Misi Polda Jatim.

1) Visi

“Terwujudnya keamanan dan ketertiban di seluruh daerah hukum Polda Jawa Timur”;

Makna Visi Polda Jawa Timur:

Propinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polda Jawa Timur.

2) Misi

“Melindungi, mengayomi dan melayani Masyarakat dilingkungan Polda Jawa Timur”

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

b. Visi dan Misi Polres Kota Malang Kota

1) Visi.

“Terwujudnya keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Malang Kota”.

Makna Visi Polresta Malang Kota:

Kota Malang menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polresta Malang Kota.

2) Misi

“Melindungi, mengayomi dan melayani Masyarakat dilingkungan Polresta Malang Kota”

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

2. Tujuan jangka menengah.

a. Tujuan jangka menengah Polda Jatim.

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Timur.
- 2) menetapkan regulasi dalam penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur.
- 3) mewujudkan SDM Polda Jawa Timur yang profesional.
- 4) modernisasi pelayanan Polda Jawa Timur.
- 5) menerapkan manajemen Polda Jawa Timur yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Tujuan jangka menengah Polresta Malang Kota.

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polresta Malang Kota.
- 2) menjamin dan melaksanakan penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kota Malang.
- 3) mewujudkan SDM unggul Polresta Malang Kota.
- 4) modernisasi pelayanan Polresta Malang Kota.
- 5) menerapkan manajemen Polresta Malang Kota yang terintegrasi dan terpercaya.

3. **Sasaran Prioritas**

a. Sasaran Prioritas Polda Jatim.

Sasaran prioritas Polda Jatim Tahun 2021 ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Harkamtibmas yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas Kamtibmas khususnya di sector Industri, Pariwisata, dan Investasi di wilayah Jawa Timur;
- 2) Mengoptimalkan pelayanan publik Polda Jatim;

3) Penegakkan.....

- 3) Penegakan hukum Secara Berkeadilan dan terpercaya;
- 4) Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Jawa Timur;
- 5) Pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan;
- 6) Regulasi dan system pengawasan yang efektif dan terpercaya.

b. Sasaran Prioritas Polresta Malang Kota

Sasaran prioritas Polresta Malang Kota merupakan penjabaran dari sasaran prioritas Polda Jatim T.A. 2021 sebagai berikut :

- 1) Harkamtibmas yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas Kamtibmas khususnya di sector Industri, Pariwisata, dan Investasi di wilayah Kota Malang;
- 2) Mengoptimalkan pelayanan publik Polresta Malang Kota;
- 3) Penegakan hukum Secara Berkeadilan dan terpercaya;
- 4) Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polresta Malang Kota;
- 5) Pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan;
- 6) Regulasi dan system pengawasan yang efektif dan terpercaya.

III. ARAH KEBIJAKAN

1. Arah Kebijakan Polda Jatim.

Kebijakan Polda Jatim dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan dan strategi Polri bidang keamanan serta dalam rangka menghadapi berbagai perkembangan lingkungan strategis di wilayah Jawa Timur pada Tahun 2021, yang dapat menimbulkan kejahatan dan ancaman terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka arah kebijakan dan strategi Polda Jatim Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Harkamtibmas yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas khususnya di sektor Industri, Pariwisata, dan Investasi di wilayah Jatim”**, yaitu:

- 1) peran intelijen Polda Jatim dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini) fungsi intelejen keamanan Polri yang di dukung personel, anggaran dan teknologi intelejen yang memadai guna menurunkan dan mengeleminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial; (giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - b) pembentukan dan pembinaan jaringan intelejen.
(giat3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog17/SP1/SS1/IKU1).
- 2) Meningkatkan pencegahan proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan secara bertahap; (giat 5076/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - b) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal; (giat 5076/prog17/SP1/ SS1/IKU1);

c) meningkatkan.....

- c) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif; (giat 5076, 5077/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - d) melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana dengan keluarganya; (giat 5076,3143/prog17/SP1/ SS1/IKU1);
 - e) pemantapan pelaksanaan Polsek Sebagai Basis Deteksi (PSBD) dalam Perpolisian Masyarakat sebagai sarana untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Polsek sebagai basis deteksi dan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam mendukung tugas deteksi serta pemberdayaan Bhabinkamtibmas dalam Perpolisian Masyarakat; (giat 5077,5080/prog17/SP1/SS1 / IKU1);
 - f) Merencanakan dan melaksanakan penggelaran operasi kepolisian kewilayahan maupun terpusat; (giat 5080/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - g) Pembentukan dan pembinaan pokdar kamtibmas yang merupakan salah satu unsur potensi masyarakat dalam menumbuhkan dan mendorong peran serta dalam binkamtibmas dengan pendekatan pada prinsip-prinsip penerapan modal polmas. (giat 5076/prog17/SP1/SS1/IKU1).
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui “*Community Policing*”;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pemberdayaan pengembalian kewenangan kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam; (giat 5076/prog17/SP1/ SS1 /IKU1);
 - b) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan asistensi penguatan KBPPP; (giat 5076/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - c) pemenuhan penambahan bhabinkamtibmas dengan satu desa satu Bhabin; (giat 5076/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - d) penguatan.....

- d) penguatan kemampuan personel Bhabinkamtibmas dalam menghadapi era new normal; (giat 5076/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - e) melaksanakan penerapan system manajemen pengamanan (SMP) bagi organisasi perusahaan dan atau kementerian / Lembaga. (giat 3112,5081/prog17/SP1/SS1/IKU1).
- 4) Penanganan Konflik secara humanis;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/ Komunitas Perempuan guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial; (giat 5076/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - b) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian untuk penanganan konflik sosial; (giat 5079/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - c) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan dalam rangka deteksi untuk memahami potensi akar masalah dan penyelesaian masalah sosial yang berpotensi mengganggu kamtibmas; (giat 5076/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - d) Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan PAM Swakarsa (siskamling/satpam); (giat 5077/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - e) Membangun Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM) dan Rukun Bhabinkamtibmas tiap-tiap desa / kelurahan yang bersumber dari APBD, CSR dari Perusahaan, Swadaya). (giat 3120,5076,5077/prog17/SP1/SS1/IKU1).
- 5) memelihara Kamseltibcarlantas untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas serta angkutan jalan;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas; (giat3133/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - melaksanakan.....

- melaksanakan sosialisasi *Indonesia Safety Driving Centre* (ISDC);
(giat3133/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - meningkatkan kerjasama lintas sektoral (Dishub, Jasaraharja,dan komponen masyarakat lainnya).
(giat 3133/prog17/SP1/SS1/IKU1);
- 6) Meningkatkan peran Polda Jatim di wilayah rawan dan bencana;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana;
(giat 5079/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - b) menyiapkan personel Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan *stakeholder* dalam penanggulangan bencana;
(giat 5079/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - c) memenuhi perlengkapan Bhabinkamtibmas terutama yang mendukung tugas pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam sosialisasi mitigasi bencana;
(giat 5076/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - d) bersama-sama instansi terkait bekerja sama membangun Pusat Penanganan Bencana, Kesehatan dan mengawasi pembagian bantuan bencana kepada masyarakat melalui kegiatan Bakti Kamtibmas; (giat 3072,5076/prog14,17/SP1/SS1/IKU1);
 - e) menyiapkan anjing pelacak dan pawang anjing yang mampu di gerakkan dalam menghadapi ketanggap segeraan penanggulangan bencana; (giat 5081/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - f) melakukan kerjasama (MOU) lintas sektoral dalam penyusunan SOP dengan instansi terkait mitigasi bencana.
(giat 3120/prog14,17/SP1/SS1/IKU1);
- 7) penggelaran operasional dan *back up* kewilayahan personel Polda Jatim dalam pengamanan unjuk rasa, konflik sosial; dan menjalin sinergitas polisional;

untuk.....

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) kesiapan personel Polda Jatim untuk mampu di gerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi; (giat 5087/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - b) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi; (giat 5087/prog17/SP1/SS1/IKU1);
 - c) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang produktif guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif. (giat5087/prog17/SP1/SS1/IKU1);
- 8) Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait, BUMN, BUMD dan swasta;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) inventarisasi *Memorandum of Understanding (MoU)* Polda Jatim dengan Pemda dan *Stakeholder* lainnya dalam rangka memperbaharui kerjasama yang habis masa berlakunya; (giat 3120/prog14,17/SP1/SS1/IKU1);
- b) meningkatkan kerjasama Polda Jatim dalam kerangka kerjasama dengan instansi terkait dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; (giat 3120/prog14,17/SP1/SS1/IKU1);
- c) pendataan instansi pemerintah dan non pemerintah yang ada hubungannya dengan tugas Polri dalam bidang Harkamtibmas; (giat 3120/prog17/SP1/SS1/IKU1);
- d) memformulasikan dan atau menginventaris potensi permasalahan yang terjadi pada instansi pemerintah dan non pemerintah yang menimbulkan gangguan Kamtibmas yang berdampak pada terganggunya Ipoleksosbud. (giat 3112/prog17/SP1/SS1/IKU1);

9) Penggelaran.....

- 9) Penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polda Jatim di wilayah industri, pariwisata guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan patroli di wilayah industri (kawasan tertentu), pariwisata serta di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai dalam rangka mencegah terjadinya gangguan kamtibmas di wilayah perairan Jawa Timur;
(giat 3134/prog17/SP1/SS1/IKU1);
- b) meningkatkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap kejahatan yang merugikan kekayaan Negara (*illegal logging, illegal fishing* dan penyalahgunaan BBM);
(giat 3137,3140,3145/prog18/SP1/SS1/IKU1);
- c) patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan;
(giat 3134/prog17/SP1/SS1/IKU1);
- d) peningkatan kualitas personel polair yang mengawaki kapal melalui pendidikan dan pelatihan;
(giat 3134,0002/prog16/SP1/SS1/IKP2);
- e) peningkatan kegiatan bintibmas perairan guna menekan gangguan kamtibmas dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut.
(giat 3134/prog17/SP1/SS1/IKU1);

- 10) pembentukan opini positif Polda Jatim;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pelaksanaan cyber patrol;
(giat 3073 /prog14/SP1/SS1/IKU1);
- b) intervensi akun temuan pelaksanaan cyber patrol;
(giat 3149/prog14/SP1/SS1/IKU1);
- c) dilakukan *counter opini* terhadap akun-akun yang memberikan opini negatif;
(giat 3149/prog14/SP1/SS1/IKU1);

d) kemitraan.....

- d) kemitraan Kerjasama dengan *nitizen* (masyarakat dunia maya) untuk memperkuat opini yang dimasukkan pada akun temuan dalam mengcounter isu yang diposting oleh akun temuan tersebut; (giat 3149/prog14/SP1/SS1/IKU1);
 - e) dilakukan *report abuse* supaya postingan tersebut tidak beredar di masyarakat dunia maya yang dimungkinkan dapat menimbulkan gangguan kamtibmas di masyarakat dunia nyata; (giat 3149/prog14/SP1/SS1/IKU1);
 - f) dilakukan *profiling* untuk mengetahui identitas keaslian akun tersebut; (giat 3149/prog14/SP1/SS1/IKU1);
 - g) kemitraan kerjasama media *mainstream* dan konvensional untuk pemberitaan positif guna memperkuat pelaksanaan counter opini. (giat 3073,3149/prog14/SP1/SS1/IKU1).
- 11) meningkatkan keahlian personil yang bertugas membuat narasi, gambar, video, untuk publik dan profiling akun provoaktif;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- meningkatkan SDM melalui pelatihan jurnalis, video editing, desain grafis, desain web dan *public relation*. (giat 3073,3149/prog14/SP1/SS1/IKU1).
- 12) Mengumpulkan dan mengolah data secara efektif dan terpercaya;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) Pelaksanaan uji konsekuensi; (giat 3149/prog14/SP1/SS1/IKU1);
 - b) Pelayanan register informasi; (giat 3149/prog14/SP1/SS1/IKU1);
 - c) Monitoring pemberitaan di media massa (cetak, elektronik dan online); (giat 3149/prog14/SP1/SS1/IKU1);
 - d) Mendokumentasikan kegiatan di Polda Jatim dan kewilayahan. (giat 3149/prog14/SP1/SS1/IKU1);
- 13) Penggelaran Patroli, layanan PAM di wilayah kawasan tertentu, pariwisata serta guna mendukung terlaksananya pengamanan di wilayah obvitnas/obyek vital tertentu;
- a) memberikan.....

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- b) meningkatkan patroli di wilayah kawasan tertentu, pariwisata serta obvitnas/obyek vital tertentu di wilayah Jawa Timur; (giat3131/prog17/SP1/SS1/IKU1);
- c) meningkatkan layanan pengamanan VIP serta obvitnas/obyek vital tertentu di wilayah Jawa Timur; (giat 3131/prog17/SP1/SS1/IKU1);
- d) memberikan serta meningkatkan asistensi, sosialisasi tentang sistem manajemen pengamanan obvitnas/obyek vital tertentu. (giat 3131/prog17/SP1/SS1/IKU1).

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ” **Mengoptimalkan pelayanan publik Polda Jatim**”, yaitu:

- 1) Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK guna mencapai kualitas pelayanan publik yang prima;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat Polda maupun Polres untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polri dan masyarakat umum; (giat 3072,5062/prog14,15/SP2/SS5/IKP7,8);
- b) pembangunan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online; (giat 3071,3084,5062/prog14,15/SP2/SS4/IKP3);
- c) peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta pelayanan keliling bidang lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik Kepolisian; (giat 3071,3084/prog14,15/SP2/SS5/IKP7,8);
- d) pengembangan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor; (giat 3071/prog14/SP1/ SS5/IKP7,8);
- e) membangun jaringan komunikasi di seluruh polres yang disentralisasikan di Polda Jatim; (giat3071/prog14/SP1/SS4/IKP4);

f) optimalisasi.....

- f) optimalisasi aplikasi Jogo Jawa Timur untuk mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada di Polres Jajaran;
(giat3071,3084/prog15/SP2/ SS4/IKP3);
 - g) mengoptimalkan perbaikan dan pemeliharaan alat komunikasi radio dan jaringan komunikasi data guna menjangkau jaringan komunikasi antar Polsek, Polres dan Polda;
(giat 3071/prog14/SP1/ SS4/IKP3);
 - h) meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait (Pemprov Surabaya, Dishub Jatim, PT. Telkom, Balmon, Kominfo Kodya Surabaya dan Dinkes Prov. Jatim, BPJS Kesehatan).
(giat 5060/prog14/SP2/SS5/IKP8)
- 2) peningkatan profesionalisme Polri dalam kualitas pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran;
(giat 3072/prog14/SP2/SS5/IKP8);
 - b) melaksanakan pelayanan surat izin operasional BUJP melalui pelayanan satu pintu di BKPM; (giat 3073/prog14/SP2/SS5/IKP8);
 - c) menyusun standar operasional prosedur untuk pelayanan PNBPFungsi Binmas; (giat 3073/prog14/SP2/SS5/IKP8);
 - d) melaksanakan pelatihan revolusi mental;
(giat 0001/prog16/SP2/SS5/IKP1);
 - e) melaksanakan pembangunan Satpas Prototipe;
(giat 5062/prog17/SP2/SS5/IKP4,7);
 - f) meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik dan secara konsisten; (giat 3073,0001/prog14,16/SP2/SS5/IKP7);
 - g) membangun sistem pelayanan secara online dalam rangka penerbitan BPKB, STNK, SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial;
(giat 3071/prog14/SP2/SS5/IKP7);
 - h) monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan Kepolisian pada pelayanan publik; (giat 0002,3073/prog14/SP2/SS5/IKP7);
 - i) membuat.....

- i) membuat sistem manajemen informasi layanan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pengurusan surat ijin operasional perusahaan, pembuatan KTA satpam;
(giat 0002,3073/prog14/SP2/SS5/IKP7).
- 3) Percepatan *quick response* Kepolisian dengan standar yang kredibel dan akuntabel;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- *quick response time* Polda Jatim dalam rangka menghadapi gangguan Kamtibmas dan unjuk rasa serta Konflik sosial dengan standar yang terukur berpedoman pada peraturan yang ada.
(giat 5077/prog17/SP2/SS5/IKP7,8).

- 4) penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan soliditas kesatuan melalui penerangan internal (lembar penerangan satuan) dan eksternal (himbauan publik berupa pamflet, spanduk); (giat 3070, 5056/prog14/SP2/SS4/IKP5);
- b) membangun kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholder terkait maupun media masa (media elektronik, cetak, online) dan forum grup diskusi; (giat 3149,5059/prog14/SP2/SS4/IKP5);
- c) membangun dan mengembangkan keterbukaan informasi publik (KIP) melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan, dan akuntabel;
(giat 3149,5059/prog14/SP2/SS4/IKP5);
- d) mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri yang positif;
(giat3149/prog14/SP2/SS4/IKP5);
- e) meningkatkan layanan informasi publik melalui penyebaran/deseminasi informasi terkait media elektronik berupa dialog interaktif oleh para konsultan/pakar/profesional guna pencitraan positif Polri; (giat 3070,5056/prog14/SP2/SS5/IKP5);
- f) Pelaksanaan anev Kamtibmas akhir tahun.
(giat3112/prog17/SP2/SS5/IKP7).

c. Arah.....

c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”**, yaitu:

- 1) Peningkatan profesionalisme penegakan hukum dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) peningkatan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Jatim; (giat 3134/prog17/SP3/SS2/IKU2);
- b) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme, karhutla/LH dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marjinal; (giat 3140, 3141, 3142, 3144, 3145, 3146, 5083 prog18/SP3/ SS2/IKU2);
- c) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (giat 3140/prog18/SP3/SS2/IKU2);
- d) melanjutkan dan meningkatkan cakupan data serta kemampuan forensik (Labfor dan Inafis) dalam pemeriksaan barang bukti dan pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation) melalui sertifikasi dan akreditasi; (giat 3141/prog18/SP3/SS2/IKU2);
- e) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel; (giat 3084/prog18/SP3/SS2/IKU2);
- f) penanganan perkara didukung sarana IT berpedoman pada prosedur ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; (giat 3144/prog18/SP3/SS2/IKU2);
- g) mengoptimalkan operasional entri data pusat data kriminal nasional dari tingkat Polda dan Polres E- Manajemen Penyidikan (E-MP); (giat 3137/prog18/SP3/SS2/IKU2);
- h) peningkatan kualitas profesi dengan mengikutsertakan anggota pada kegiatan Dikbangpers dan pelatihan Gadik fungsi teknis Kepolisian dan penyidik/penyidik pembantu. (giat 0001,3137/prog16,18/SP3/SS2/IKU2);

2) melaksanakan.....

- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik dalam rangka peningkatan kompetensi penyidik sesuai dengan fungsinya;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polda Jatim; (giat 0001/prog16/SP3/SS3/IKP1);
 - b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengelolaan TKP; (giat 0001, 3141/prog16,18/SP3/SS3/IKP1);
 - c) peningkatan kualitas profesi dengan mengikutsertakan anggota pada kegiatan sertifikasi Gadik fungsi teknis Kepolisian dan penyidik/penyidik pembantu; (giat 0001/prog16/SP3/SS3/IKP2);
 - d) melakukan seleksi administrasi awal sebelum mengusulkan penyidik mengikuti sertifikasi; (giat 0001/prog16/SP3/SS3/IKP2);
 - e) update data penyidik yang sudah bersertifikasi. (giat 3100/prog16/SP3/SS3/IKP1).
- 3) meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melakukan kerja sama dibidang penyelidikan dan penyidikan; (giat 3137/prog18/SP3/SS2/IKU2);
- b) mengembangkan sistem pengawasan penyidik secara elektronik (e-penyidikan); (giat 5086/prog18/SP3/SS2/IKU2);
- c) melakukan anev pengisian E- penyidikan; (giat 3137, 5086/prog18/SP3/SS2/IKU2);
- d) menjadikan E- penyidikan sebagai alat ukur kinerja penyidik; (giat 3071, 3137, 5086/prog14, 18/SP3/SS2/IKU2);
- e) mengedepankan aplikasi SP2HP online. (giat 3071, 3137, 5086/prog14, 18/SP3/SS2/IKU2);

d) menjadikan.....

- 4) Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal dalam rangka peningkatan pengawasan penyidikan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antar Satker Ditreskrim, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba Polda Jatim; (giat 3137/prog18/SP3/SS2/IKU2);
- b) mengintegrasikan sistem data informasi kriminal antar penegak hukum; (giat 3137/prog18/SP3/SS2/IKU2);
- c) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP; (giat 3137/prog18/SP3/SS2/IKU2);
- d) mengedepankan fungsi Wassidik dalam upaya pelayanan penyidikan yang lebih baik; (giat 5086/prog18/SP3/SS2/IKU2);
- e) membuat sistem pendataan kasus kriminalitas yang terekam atau tercatat dalam buku register B-1 sampai dengan B-18 serta register lain yang masih bersifat konvensional; (giat 5086/prog18/SP3/SS2/IKU2);
- f) melakukan anev bulanan dalam penanganan kasus. (giat 3137, 5084/prog18/SP3/SS2/IKU2).

- 5) Optimalisasi Alternative Dispute Resolution (ADR) oleh Bhabinkamtibmas / Polmas yaitu penyelesaian masalah di masyarakat mengedepankan musyawarah;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) peningkatan penyelesaian masalah/sengketa di masyarakat yang mengedepankan musyawarah (secara kekeluargaan/mufakat); (giat 5076/prog17/SP3/SS2/IKU2);
- b) memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan aktifitas di malam hari; (giat 5077/prog18/SP3/SS2/IKU2);
- c) mengedepankan bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan (Tipiring). (giat 3137/prog17/SP3/SS2/IKU2).

d. arah.....

d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polda Jatim”** yaitu:

1) pembenahan pola Diklat yang siap kerja (vokasi);

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) *upgrading* kurikulum yang meliputi 70% praktik dan 30% teori seluruh pendidikan; (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP2);
- b) *upgrading* dan sertifikasi Gadik/instruktur; (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP1);
- c) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas; (giat 0001,5076,3130,5087/prog16,17/SP4/SS3/IKP2);
- d) peningkatan kapasitas SDM bidang siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik; (giat 0001,3151,3141/prog16,18/SP4/SS3/IKP1);
- e) sertifikat profesi anggota Polri; (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP1);
- f) pelatihan Revolusi mental di lingkungan Polri. (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP1).

2) tersusunnya program penyiapan kader unggul;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menindaklanjuti Perpol Nomor 3 Tahun 2019 tentang manajemen talenta Polri untuk mewujudkan kader unggul yang dapat berkompetitif; (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP1);
- b) menyiapkan kader pimpinan Polri yang bersih, dan bebas dari praktik KKN; (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP1);
- c) pembinaan rohani, jasmani, dan mental bagi anggota Polri; (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP1);
- d) melaksanakan pemilihan Polisi teladan sebagai penggerak Revolusi Mental dan peloppor tertib social di ruang Publik; (giat0001/prog16/SP4/SS3/IKP1);

e) melaksanakan.....

- e) melaksanakan program Binlat bagi masyarakat yang akan mengikuti rekrutmen anggota Polri dan anggota Polri yang akan mengikuti seleksi Dikbangun Polri. (giat 0001 /prog16/SP4/SS3 /IKP2).
- 3) penataan kelembagaan Polri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) penerapan proses bisnis di pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi; (giat 3073/prog14/SP4/SS5/IKP7);
- b) menyelenggarakan kegiatan penataan kelembagaan tipe Polres Polsek dan Polsubsektor; (giat 0002/prog14/SP4/SS5/IKP7);
- c) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis analisa beban kerja dan HTCK pada Satfung Polda dan Satwil jajaran; (giat 0002/prog14/SP4/SS5/IKP7);
- d) peningkatan kemampuan ITK satker Polda Jatim dan satker kewilayahan. (giat 5053/prog14/SP4/SS5/IKP7);
- 4) melaksanakan rekrutmen anggota Polri dan seleksi Dikbangun serta pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan dengan prinsip "BETAH" berbasis TI;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) menyelenggarakan rekrutmen dan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan aplikasi Computer Assisted Test (CAT); (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP2);
- b) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang tahun guna mendapatkan calon anggota Polri yang berkualitas; (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP2);
- c) melaksanakan uji kompetensi melalui kegiatan *Assessment Center* dalam seleksi Dikbangun dan pembinaan karir personel; (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP2);
- d) melaksanakan bijak Diklat aparatur sesuai dinamika pelaksanaan tugas untuk menciptakan SDM Polda Jatim yang Promoter; (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP2);
- e) melaksanakan.....

- e) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;
(giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP1);
 - f) pengembangan peralatan *Assessment Center* Polda Jatim dan pengadaan peralatan *e-mapping* psikologi;
(giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP2);
 - g) mengembangkan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) berbasis TI untuk membenahi database SDM Polda Jatim berupa pendataan ulang Polri dan PNS secara elektronik sehingga senantiasa *up to date*; (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP1);
 - h) penguatan jaringan internet secara temporer;
(giat 3071/prog14/SP4/SS3/IKP1);
 - i) melibatkan LSM dan instansi terkait serta pengawas internal dalam rekrutmen anggota Polri. (giat0001/prog16/SP4/SS3/IKP1);
- 5) pembinaan karier berbasis meritokrasi dan kompetensi serta penyusunan rumpun jabatan fungsional, diluar struktur dan sertifikasi profesi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (*open bidding*) dalam pembinaan karier personel secara *merryt system* melalui Asesmen Center; (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP1);
- b) sertifikasi terhadap personel Polri sesuai dengan fungsi Kepolisian; (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP1);
- c) melanjutkan penyusunan regulasi rumpun jabatan fungsional;
(giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP1);
- d) melaksanakan *mapping* jabatan fungsional dari tingkat Polda Jatim sampai dengan Satker kewilayahan;
(giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP1);
- e) menyelenggarakan seleksi jabatan fungsional secara terbuka;
(giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP2);
- f) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri;
(giat 0001/prog14/SP4/SS3/IKP1);

g) berkoordinasi.....

- g) berkoordinasi instansi terkait serta pihak swasta tentang penugasan di luar struktur.
(giat 001/prog16/SP4/SS3/IKP1).
- 6) Peningkatan kualitas perencanaan melalui aplikasi *online* pada satuan kerja;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) monitoring sinkronisasi data dalam pengusulan anggaran Satker Polda Jatim melalui aplikasi penganggaran secara *online* SMAP dan SMART; (giat 3071,5054/prog16/SP4/SS4/IKP3,4);
- b) melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE Polda Jatim. (giat 5059/prog15/SP4/SS3/IKP1).
- 7) kajian peningkatan Tunjkin lebih dari 70%;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengajukan usulan kenaikan persentase tunjangan kinerja lebih dari 70%; (giat 5054/prog14/SP4/SS5/IKP6);
- b) mendorong Satker Polda Jatim untuk mengikuti Zona Integritas (ZI). (giat 5054/prog14/SP4/SS5/IKP6, 7).
- 8) Meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan fasilitas kesehatan serta keselamatan bagi aparatur Polri dan keluarganya di Polda Jatim secara berkelanjutan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan pemenuhan perumahan ASABRI dan YKPP (Yayasan Kesejahteraan Perumahan dan Pendidikan) bagi anggota Polri/PNS; (giat 5062/prog15/SP4/SS3/IKP1);
- b) meningkatkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai negeri pada Polri;
(giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP1);
- c) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan kepada aparatur Polri dan masyarakat umum; (giat 3072/prog14/SP4/SS5/IKP7);
- d) peningkatan.....

- d) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bahyangkara dengan standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS); (giat 3072, 3073/prog14/SP4/SS3/IKP1);
 - e) peningkatan standar akreditasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) oleh Komisi akreditasi Kemenkes; (giat 3072, 3073/prog14/SP4/SS3/IKP1);
 - f) melaksanakan latihan keterampilan bagi anggota Polri dan PNS menjelang pensiun. (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP1).
- 9) Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana serta fasilitas pendidikan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menginventarisir kebutuhan fasilitas pendidikan untuk mengoptimalkan operasional pendidikan; (giat 0001/prog16/SP4/SS3/IKP2);
 - b) menyusun standarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan ideal yang dipersyaratkan melalui borang/*check list* dari Lemdiklat polri; (giat 5059, 0001/prog15, 16/SP4/SS3/IKP2);
 - c) pengembangan peralatan SIPP untuk mendukung terlaksananya pengisian SMK online. (giat 5059, 0001/prog15, 16/SP4/SS3/IKP2).
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan”**, yaitu:

- 1) pengembangan dan Pemenuhan kebutuhan perlengkapan Alpalkam dan Almatsus Polda Jatim yang sesuai dengan teknologi terkini;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polda Jatim; (giat 3084/prog15/SP5/SS4/IKP3,4);
- b) mengajukan rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA, penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insujensi ke Mabes Polri; (giat 3084/prog15/SP5/SS4/IKP3,4);

c) melanjutkan.....

- c) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polda Jatim (Min dan Maks);
(giat 3084/prog15/SP5/SS4/IKP3,4);
 - d) mendistribusikan Alpalkam dan Almatsus ke Satker-satker di wilayah Polda Jatim berdasarkan skala prioritas;
(giat 3084, 5059/prog15/SP5/SS4/IKP3,4);
 - e) melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK *online*;
(giat 3133/prog17/SP5/SS5/IKP7);
 - f) melaksanakan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan Inventarisasi Barang Bukti Secara Transparan dan Akuntabel;
(giat 5086/prog18/SP5/SS3/IKP1);
 - g) mengusulkan pengadaan perlengkapan keselamatan anggota dalam situasi kontijensi. (giat 3084/prog15/SP5/SS5/IKP8).
- 2) peningkatan pemenuhan rumah dinas aparaturnya Polri dan pembangunan fasilitas perkantoran di Polda Jatim;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri; (giat 5062/prog15/SP5/SS4/IKP3);
 - b) melakukan inventarisasi kondisi riil atas fasilitas perkantoran dan rumah dinas; (giat 5059/prog15/SP5/SS4/IKP3);
 - c) melakukan pemetaan skala prioritas terhadap rencana pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas;
(giat 5062/prog15/SP5/SS4/IKP4);
 - d) menyusun rencana kebutuhan fasilitas perkantoran dan rumah dinas; (giat 5059/prog15/SP5/SS4/IKP4);
 - e) melaksanakan pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas secara selektif, prioritas dan berkelanjutan.
(giat 5062/prog15/SP5/SS4/IKP4);
- 3) Valuasi pengusulan dan pendistribusian pemenuhan kebutuhan perlengkapan Alpalkam dan Almatsus Polda Jatim;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menginventarisasi.....

- a) menginventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Satker Polda Jatim dan jajaran; (giat 5059/prog15/SP5/SS4/IKP4);
 - b) menyusun kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Satker Polda Jatim dan jajaran; (giat 5059/prog15/SP5/SS4/IKP3,4);
 - c) melakukan evaluasi pengusulan pemenuhan kebutuhan perlengkapan Alpalkam dan Almatsus Polda Jatim dengan skala prioritas; (giat 5059/prog15/SP5/SS4/IKP3,4);
 - d) melakukan rekapitulasi pendistribusian materiil logistik (Alpalkam/ Almatsus) Satker Polda Jatim dan Jajaran hasil pengadaan Slog Mabes Polri; (giat 3084/prog15/SP5/SS4/IKP3,4);
 - e) melakukan usulan penghapusan almatsus yang kondisinya rusak berat. (giat 5059/prog15/SP5/SS4/IKP3);
- 4) pengembangan Almatsus *Scientific Crime Investigation (SCI)*;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan sarana prasarana penyelidikan dan penyidikan serta bantuan teknis yang memenuhi standar investigasi tindak pidana secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation-SCI*); (giat 5062/prog15/SP5/SS4/IKP3, 4);
 - b) pengembangan Almatsus siber dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana siber; (giat 5062/prog15/SP5/SS4/IKP3);
 - c) melengkapi peralatan laboratorium forensik dan sidik jari dengan teknologi terkini. (giat 5062/prog15/SP5/SS4/IKP3).
- 5) pembangunan SPKT tingkat Polres dan Polsek serta pembangunan Satpas sesuai SPM secara online.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- pengembangan aplikasi dalam rangka penatausahaan tatakelola pergudangan. (giat 3084/prog15/SP5/SS4/IKP3,4).
- 6) pembangunan pusat pergudangan yang modern dan terintegrasi serta pusat pelayanan pengadaan Polda Jatim.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

pengembangan.....

- pengembangan aplikasi dalam rangka penatausahaan tatakelola pergudangan.
(giat 3071, 5059/prog14, 15/SP5/SS4/IKP5);
- 7) Modernisasi sarpras Binmas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) mengusulkan peralatan untuk sarana Pullahjianta (pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data) yang cepat dan akurat pada satuan fungsi Binmas; (giat 3084/prog15/SP5/SS4/IKP4,5);
 - b) mengusulkan sarana Almatsus pendukung kegiatan operasional dan penyuluhan fungsi Binmas;
(giat 3084/prog15/SP5/SS4/IKP3);
 - c) mengusulkan kekurangan unit mobil penyuluhan fungsi Binmas untuk Satbinmas Polres jajaran Polda Jatim.
(giat 3084/prog15/SP5/SS4/IKP3);
- 8) Pembangunan sarpras berbasis TIK terkait kejahatan Siber
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) pengembangan Almatsus Siber dalam rangka pengungkapan kasus tindak pidana; (giat 3084/prog15/SP5/SS4/IKP3);
 - b) mengusulkan kembali pembangunan *Cyber Digital Lab* pada Unit Siber di Polda Jatim.
(giat3084,5062/prog15/SP5/SS4/IKP3).
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya**”,yaitu:
 - 1) peningkatan peran Yanduan dalam rangka penanganan publik komplain dan mengoptimalkan sarana aplikasi lapor secara efektif dan terpercaya;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) monitoring dan evaluasi penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; (giat 3091/prog14/SP6/SS5/IKP10);
 - b) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* (E-lapor) dengan bagian pelayanan dan pengaduan Itwasda dan Bidpropam Polda Jatim;
(giat 3071, 3091/prog14/SP6/SS5/IKP10);
 - c) percepatan.....

- c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal; (giat 3091/prog14/SP6/SS5/IKP10);
 - d) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka; (giat 5086/prog18/SP6/SS5/IKP11);
 - e) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan Wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar; (giat 5086/prog18/SP6/SS3/IKP11);
 - f) memberikan kepastian hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. (giat 3154, 5086/prog14, 18/SP6/SS3/IKP11);
- 2) penguatan saber pungli;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerja sama dengan KPK RI, Kompolnas RI dan Ombudsman RI; (giat 3091/prog14/SP6/SS5/IKP10);
 - b) pembangunan sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari tingkat kewilayahan sampai dengan tingkat Polda. (giat 3091/prog14/SP6/SS4/IKP5).
- 3) pencegahan Korupsi di internal Polri;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pelaksanaan sosialisasi Perkap Nomor 8 Tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 Tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah Bagi Anggota Polri dan PNS Polri; (giat3091/prog14/SP6/SS5/IKP11);
 - b) peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan Kepolisian; (giat3091,3088/prog14/SP6/SS5/IKP10);
 - c) mengembangkan sistem pengawasan hasil temuan wasrik berbasis *online*; (giat 3091/prog14/SP6/SS5/IKP10);
 - d) pembangunan.....

- d) pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang pelaksanaannya bekerjasama dengan BPKP, LSM anti korupsi dan Ombudsman perwakilan Jatim;
(giat 3088, 3091/prog14/SP6/SS5/IKP10);
- e) memperkuat kerjasama dengan pengawas Eksternal dan pengawas internal pada kegiatan seleksi penerimaan anggota Polri/PNS. (giat 3088, 3091/prog14/SP6/SS5/IKP10);
- f) meningkatkan pengawasan melekat terhadap anggota Polri yang memegang jabatan operasional atau pelaksana tugas operasional. (giat 3073, 0001/prog14,16/SP6/SS5/IKP8).
- 4) pengawasan berbasis TI;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- penerapan sistem pengaduan masyarakat secara *online*.
(giat3071/prog14/SP6/SS5/IKP10);
- 5) penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polri yang efektif dan efisien;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan; (giat 0002/prog14/SP6/SS1/IKU1);
 - b) penataan daerah hukum kesatuan kewilayahan;
(giat 0002/prog14/SP6/SS1/IKU1);
 - c) penguatan organisasi tingkat Polda Jatim dan kewilayahan.
(giat 0002/prog14/SP6/SS1/IKP1).
- 6) meningkatkan SDM keuangan Polri yang kompetitif;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Polda Jatim secara terencana, berkesinambungan dan secara cermat; (giat 0001/prog16/SP6/SS3/IKP1);

b) peningkatan.....

- b) peningkatan kualitas pemantauan tindak lanjut dari hasil pengendalian dan pengawasan melalui pengimplementasian monitoring dan evaluasi dengan sistem informasi yang terintegrasi. (giat 0001/prog16/SP6/SS3/IKP1).
- 7) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Polda Jatim dan jajaran mempersiapkan kelengkapan dan mengikuti pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Srena Polri melalui Indeks Tata Kelola Polri (ITK) berbasis *web* dan *mobile* secara *online* (ITK-O) tingkat Polres Kota bes/ Polres Kota / Polres dan Satker Polda; (giat 5053/prog14/SP6/SS5/IKP8);
- b) mempertahankan capaian Satker/Satwil Zona Integritas bagi Satker/ Satwil yang sudah mendapatkan predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta meningkatkan Satker/ Satwil zona integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); (giat 5053/prog14/SP6/SS5/IKP8);
- c) asistensi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik serta survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polres Kota /Polres Kota bes dan Polres Metro agar sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (giat 5053/prog14/SP6/SS5/IKP8);
- d) melaksanakan bimbingan dan mempersiapkan Satker untuk berinovasi dalam pelayanan publik guna mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik. (giat 5053/prog14/SP6/SS5/IKP8).

2. Arah Kebijakan Polresta Malang Kota

Kebijakan Polres Kota Malang Kota dalam rangka melaksanakan *strive for excellence* dan pencapaian kebijakan Polri dibidang keamanan di wilayah Kota Malang pada tahun 2021, yang dapat menimbulkan kejahatan dan ancaman terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka Polresta Malang Kota akan melaksanakan kebijakan yang telah dicanangkan oleh Kapolri dan Kapolda Jatim antara lain sebagai berikut :

a. Arah.....

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Harkamtibmas yang kondusif dalam rangka menjaga stabilitas kamtibmas khususnya di sektor Industri, Pariwisata, dan Investasi di wilayah di wilayah hukum Polresta Malang Kota”**, yaitu:

- 1) peran intelijen Polres Kota Malang Kota dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini) fungsi intelejen keamanan Polri yang di dukung personel, anggaran dan teknologi intelejen yang memadai guna menurunkan dan mengeleminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial; (aktifitas 3112, 3114, 3115, 3116, 3117 / prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1).
- b) pembentukan dan pembinaan jaringan intelejen. (aktifitas 3112, 3114, 3115, 3116, 3117 / prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1).

- 2) meningkatkan pencegahan proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta terorisme;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :

- a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan secara bertahap; (aktifitas 5076 / prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
- b) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif; (aktifitas 5076 / prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
- c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah Pancasila untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal; (aktifitas 5076 / prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
- d) melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap individu atau kelompok dan sosialisasi terhadap mantan narapidana dengan keluarganya; (aktifitas 5076 / prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);

e) pemantapan.....

- e) pemantapan pelaksanaan Polsek Sebagai Basis Deteksi (PSBD) dalam Perpolisian Masyarakat sebagai sarana untuk mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan Polsek sebagai basis deteksi dan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dalam mendukung tugas deteksi serta pemberdayaan Bhabinkamtibmas dalam Perpolisian Masyarakat;
(aktifitas 5076 / prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
 - f) merencanakan dan melaksanakan penggelaran operasi kepolisian kewilayahan maupun terpusat;
(aktifitas 5076, 3133,5080 / prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
 - g) pembentukan dan pembinaan pokdar kamtibmas yang merupakan salah satu unsur potensi masyarakat dalam menumbuhkan dan mendorong peran serta dalam binkamtibmas dengan pendekatan pada prinsip-prinsip penerapan model Polmas. (aktifitas 5076 / prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1).
- 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat melalui "*Community Policing*";
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam;
(aktifitas 5076/ prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1).;
 - b) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas;
(aktifitas 5076/ prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
 - c) penguatan kemampuan personel Bhabinkamtibmas dalam menghadapi era new normal;
(aktifitas 5076/ prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
 - d) melaksanakan penerapan system manajemen pengamanan (SMP) bagi organisasi , perusahaan dan atau kementerian / Lembaga. (aktifitas 5076/ prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1).
- 4) Penanganan Konflik secara humanis;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pemberian.....

- a) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/ Komunitas Perempuan guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial;
(aktifitas 5076/ prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
 - b) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian untuk penanganan konflik sosial;
(aktifitas 3128 / prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
 - c) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan dalam rangka deteksi untuk memahami potensi akar masalah dan penyelesaian masalah sosial yang berpotensi mengganggu kamtibmas;
(aktifitas 5076/ prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
 - d) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan PAM Swakarsa (siskamling/satpam) , giat cangkrukan dan giat Istighosah maupun Tabligh Akbar;
(aktifitas 5076/ prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
 - e) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme, radikalisme dan intoleransi melalui kegiatan preemtif dan preventif (Sambang, anjangsana, silaturahmi kepada seluruh elemen masyarakat antara lain ormas, toga/tomas, ulama yang berpengaruh kepada masyarakat, LSM);
(aktifitas 5076/ prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1).
- 5) memelihara Kamseltibcarlantas untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas serta angkutan jalan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas;
(aktifitas 3133 / prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
 - b) melaksanakan sosialisasi *Indonesia Safety Driving Centre* (ISDC);
(aktifitas 5076/ prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
 - c) meningkatkan kerjasama lintas sektoral (Dishub, Jasaraharja,dan komponen masyarakat lainnya).
(aktifitas 5076/ prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
- 6) pembentukan opini positif Polresta Malang Kota;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

6) meningkatkan.....

- a) pelaksanaan cyber patrol;
(aktifitas 3070/ prog 060.01.WA/ SP1/ SS4/ IKU4);
 - b) intervensi akun temuan pelaksanaan cyber patrol;
(aktifitas 3070/ prog 060.01.WA/ SP1/ SS4/ IKU4);
 - c) dilakukan *counter opini* terhadap akun-akun yang memberikan opini negatif; (aktifitas 3070/ prog 060.01.WA/ SP1/ SS4/ IKU4);
 - d) dilakukan *take down* supaya postingan tersebut tidak beredar di masyarakat dunia maya yang dimungkinkan dapat menimbulkan gangguan kamtibmas di masyarakat dunia nyata;
(aktifitas 3070/ prog 060.01.WA/ SP1/ SS4/ IKU4);
 - e) dilakukan *profiling* untuk mengetahui identitas keaslian akun tersebut; (aktifitas 3070/ prog 060.01.WA/ SP1/ SS4/ IKU4).
- 7) mengumpulkan dan mengolah data secara efektif dan terpercaya;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) monitoring pemberitaan di media massa (cetak,elektronik dan online); (aktifitas 3070/ prog 060.01.WA/ SP1/ SS4/ IKU4);
 - b) mendokumentasikan kegiatan di Polresta Malang Kota dan Polsek Jajaran. (aktifitas 3070/ prog 060.01.WA/ SP1/ SS4/ IKU4).
- 8) penggelaran Patroli, layanan pengamanan di wilayah kawasan tertentu, wilayah obvitnas/obyek vital serta pengamanan kegiatan masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan patroli di wilayah kawasan tertentu, pariwisata serta obvitnas/obyek vital tertentu di wilayah kota Malang;
(aktifitas 3130, 3131, 3133 / prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
 - b) meningkatkan layanan pengamanan VIP serta obvitnas/obyek vital tertentu di wilayah Kota Malang;
(aktifitas 3130, 3131, 3133 / prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1);
 - c) memberikan serta meningkatkan asistensi, sosialisasi tentang sistem manajemen pengamanan obvitnas/obyek vital tertentu.
(aktifitas 3130, 3131, 3133 / prog 060.01.BQ/ SP1/ SS1/ IKU1).

b. Arah.....

b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas
” **Mengoptimalkan pelayanan publik Polresta Malang Kota**”, yaitu:

- 1) peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka mempertahankan predikat WBK dan WBBM Polresta Malang Kota melalui peningkatan profesionalitas Polri baik kegiatan operasional maupun pembinaan SDM Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) quick respons dalam pemantauan kondisi keamanan baik lalu lintas, pergerakan personil Polri maupun gangguan kamtibmas yang terintegrasi dalam “ Command Center”;
(aktifitas 3128 / prog 060.01.BQ, / SP2/ SS3,5/ IKU 3,5);
- b) optimalisasi aplikasi Jogo Malang untuk mempermudah masyarakat dalam proses pelaporan dimana pelaporan bisa diakses secara online dan datang hanya dengan menunjukkan barcode dari HP android kemudian petugas mengkonfirmasi tentang kebenaran laporan polisi;
(aktifitas 3128 / prog 060.01.BQ, / SP2/ SS3,5/ IKU 3,5);
- c) melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan fungsi teknis kepolisian; (aktifitas 3128 / prog 060.01.BQ / SP2/ SS3/ IKU 3);
- 2) optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui berbagai inovasi yang berbasis IT.

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya pelayanan prima Polri berbasis teknologi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polresta Malang Kota yang akan dilakukan adalah :

- a) pelayanan SKCK secara online;
(aktifitas 3128 / prog 060.01.BQ / SP2/ SS 5/ IKU 5);
- b) menyediakan pelayanan publik ditempat umum yaitu Mall Plaza Araya Malang SIM Corner, Alun alun Kota Malang untuk Samsat painmet Point, Pos Bandung dan Pos Mitra 2 untuk Samsat Keliling; (aktifitas 3128 / prog 060.01.BQ / SP2/ SS 5/ IKU 5);
- c) kemudahan pelayanan pada masyarakat untuk pengurusan SKCK, perpanjangan SIM, pelaporan kehilangan melalui Inovasi “Arema Police Sobo Kelurahan” adanya SIM Keliling, Samsat Corner, Samsat Keliling, adanya perbaikan pelayanan untuk penyandang disabilitas melalui SAMA RASA, pelayanan besuk tahanan online melalui inovasi BAKSO MAKOTA. (aktifitas 3128 / prog 060.01.BQ / SP2/ SS 5/ IKU 5);

d) mengembangkan.....

- d) mengembangkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) layanan Polisi 110 yang berbasis teknologi guna mewujudkan layanan informasi publik yang profesional, transparan dan akuntabel melalui media elektronik, media cetak dan media online);
(aktifitas 3128 / prog 060.01.BQ / SP2/ SS 5/ IKU 5);
 - e) mengintensifkan penggunaan media sosial untuk membangun citra Polri yang positif melalui website www.polrestamalangkota.id. (aktifitas 3128 / prog 060.01.BQ / SP2/ SS 4,5/ IKU 4,5).
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”**, yaitu:
- 1) Peningkatan profesionalisme penegakan hukum dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marjinal;
(aktifitas 3142, 3144, 3146 / prog 060.01.BI /SP 3/SS 2/ IKU2);
 - b) penggelaran dan pembentukan team sus sesuai dengan pemetaan pola waktu dan tempat kejadian rawan kejahatan melalui penentuan lokasi kring serse antara lain :
 - (1) team sus pemburu kejahatan jalanan (Hunter Makota),
 - (2) team sus penanganan korban kejahatan kekerasan seksual anak dan perempuan,
 - (3) team pencegahan dan pembinaan kenakalan anak dan remaja
(aktifitas 3142, 3144, 3146 / prog 060.01.BI /SP 3/SS 2/ IKU2);
 - c) Tindakan tegas dan terukur bagi para pelaku kejahatan jalanan maupun tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marjinal;
(aktifitas 3142, 3144, 3146 / prog 060.01.BI /SP 3/SS 2/ IKU2);
 - d). Release.....

- d) Release ungkap kasus secara rutin sehingga secara tidak langsung diketahui oleh masyarakat dan memberikan efek jera bagi para pelaku. (aktifitas 3070/ prog 060.01.WA/ SP3/ SS2/ IKU2);
 - e) pengembangan komunikasi jaringan dengan informan yang didukung dengan anggaran khusus pembinaan jaringan informan; (aktifitas 3142, 3144, 3146 / prog 060.01.BI /SP 3/SS 2/ IKU2);
 - f) pemetaan daerah rawan (Rayonisasi) kriminalitas, narkoba sesuai dengan kondisi wilayah kejadian kejahatan dan terhubung antara Polres Kota Malang Kotadan Polsek jajaran, serta secara digital dapat diketahui anggota opsnal yang ada dilapangan; (aktifitas 3142, 3144, 3146 / prog 060.01.BI /SP 3/SS 2/ IKU2);
 - g) tersedianya database pelaku kriminalitas secara digital guna optimalisasi untuk ungkap kasus kejahatan; (aktifitas 3142, 3144, 3146 / prog 060.01.BI /SP 3/SS 2/ IKU2);
 - h) melanjutkan dan meningkatkan cakupan data serta kemampuan identifikasi dalam pemeriksaan barang bukti dan pengolahan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation); (aktifitas 3142, 3144, 3146 / prog 060.01.BI /SP 3/SS 2/ IKU2);
 - i) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel; (aktifitas 3142 / prog 060.01.BI /SP 3/SS 2/ IKU2);
- 2) pemantapan kemampuan penyidikan tindak pidana dalam rangka peningkatan pengawasan penyidikan guna minimalis complain / pengaduan masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi Polresta Malang Kota yang akan dilakukan :

- a) pemantapan kemampuan terhadap kinerja anggota baik penyidik maupun opsnal dengan pemberian pelatihan fungsi teknis kepolisian maupun teknik dasar lainnya (menembak, beladiri Polri); (aktifitas 3128 / prog 060.01.BQ / SP3/ SS 3/ IKU 3);
- b) mengedepankan fungsi Wassidik dalam upaya pelayanan penyidikan yang lebih baik; (aktifitas 3188,3189,3190,3191/ prog 060.01.WA/SP3/SS 5/IKU7);
- c) klarifikasi jawaban apabila ada komplain / pengaduan terhadap penanganan kasus; (aktifitas 3188,3189,3190,3191/ prog 060.01.WA/SP3/SS 5/IKU7);

d) mempermudah.....

d) mempermudah akses informasi melalui SPHP online
(aktifitas 3142 / prog 060.01.BI /SP 3/SS 2/ IKU2);

3) mengoptimalkan penegakkan hukum kejahatan Siber yang dilakukan oleh jaringan nasional maupun internasional;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi Polresta Malang Kota yang akan dilakukan adalah:

a) pelaksanaan *cyber troop* dan pembentukan opini positif;
(aktifitas 3070/ prog 060.01.WA/ SP3/ SS4/ IKU4);

b) peningkatan *cyber security*;
(aktifitas 3070/ prog 060.01.WA/ SP3/ SS2/ IKU2);

c) peningkatan sinergi *Criminal Justice System* (CJS) dalam rangka penegak hukum terhadap kejahatan siber.
(aktifitas 3142 / prog 060.01.BI /SP 3/SS 2/ IKU2).

4) Optimalisasi Alternative Dispute Resolution (ADR) oleh Bhabinkamtibmas /Polmas yaitu penyelesaian masalah di masyarakat mengedepankan musyawarah;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) peningkatan penyelesaian masalah / sengketa di masyarakat yang mengedepankan musyawarah (secara kekeluargaan / mufakat); (aktifitas 5076/prog 060.01.BQ/SP3/SS2/IKU2);

b) memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan aktifitas di malam hari;
(aktifitas 3130 / prog 060.01.BQ/SP3/SS1/IKU1);

c) mengedepankan fungsi Sabhara dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan (Tipiring).
(aktifitas 3142/ prog 060.01.BI/SP3/SS2/IKU2).

d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polresta Malang Kota”** yaitu:

1) meningkatkan profesionalisme anggota Polri maupun ASN Polresta Malang Kota dan Polsek jajaran.

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya profesionalisme anggota Polri / ASN. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka kegiatan Polresta Malang Kota yang akan dilakukan adalah :

a) melaksanakan.....

- a) melaksanakan giat peningkatan kemampuan bagi anggota Polri maupun ASN melalui pelatihan :
- (1) Pelatihan VCD Fungsi teknis kepolisian (pelatihan F.T Intelkam, F.T Reskrim, F.T Binmas, F.T Sabhara dan F.T Lantas);
 - (2) Pelatihan Beladiri Polri secara berkala;
(aktifitas 3128/ prog 060.01.BQ / SP 4/SS 3/ IKP 3).
- b) melaksanakan pembinaan pelatihan terhadap calon peserta anggota Polri di Polresta Malang Kota;
(aktifitas 3128/ prog 060.01.BQ / SP 4/SS 3/ IKP 3).
- 2) penyusunan analisa beban kerja, menginput data dimensi dan indikator kesatuan kewilayahan pada SIK3 dan mendukung pengembangan struktur organisasi Kepolisian;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
- a) menyusun dan menginput data dan dimensi indikator kesatuan kewilayahan Polres Kota Malang Kota pada aplikasi SIK 3;
(aktifitas 5053 / prog 060.01.WA/SP 4/ SS3/ IKP 3).
 - b) menyusun usulan Perpol HTCK Polresta Malang Kota menyesuaikan dengan Perkap 02 Tahun 2021 tentang struktur organisasi Polres / Polsek.
(aktifitas 3073 / prog 060.01.WA /SP 4/SS3 / IKP 3).
- 3) peningkatan kualitas perencanaan anggaran melalui aplikasi *online* pada satuan kerja serta monev pelaksanaan anggaran;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi Polresta Malang Kota yang akan dilakukan :
- a) sinkronisasi data dalam pengusulan anggaran Polresta Malang Kota melalui aplikasi penganggaran secara *online*;
(aktifitas 3073 / prog 060.01.WA /SP 4/SS5 / IKP 6).
 - b) melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui LPSE Polda Jatim.
(aktifitas 5059 / prog 060.01.BP /SP 4/SS5 / IKP 6).
 - c) melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan;
(aktifitas 3073 / prog 060.01.WA /SP 4/SS5 / IKP 6).

d) monitoring.....

- d) monitoring dan sinkronisasi pelaksanaan anggaran melalui aplikasi *online* SMAP dan SMART;
(aktifitas 3073 / prog 060.01.WA /SP 4/SS5 / IKP 6).
 - e) melaksanakan Bintek dan asistensi ke Bag/Sat/Si dan Polsek Jajaran Polresta Malang Kota;
(aktifitas 5077 / prog 060.01.BQ /SP 4/SS5 / IKP 6).
- 4) memberi pelayanan bantuan dan penerapan hukum di tingkat Polresta Malang Kota. Arah kebijakan yang akan dilakukan antara lain :
- a) memberikan pelayanan terhadap institusi personel Polri / PNS dan keluarganya;
 - b) memberikan saran dan hukum terhadap permasalahan anggota yang sudah dilakukan penyidikan oleh provos dan bertanggungjawab atas putusan hasil sidang;
 - c) melaksanakan penyuluhan Hukum kepada personel Polri / PNS beserta Keluarga dan Masyarakat;
 - d) melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang membutuhkan pendampingan hukum. (aktifitas 3155 / prog 060.01.WA /SP 4/SS1 / IKP 1).
- 5) Peningkatan kesejahteraan personel Polri dalam rangka meningkatkan Profesionalisme;

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya kesejahteraan personel Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polresta Malang Kota yang akan dilakukan adalah :

- a) menyeleksi, mengajukan dan mendistribusikan gaji serta tunjangan kinerja terhadap anggota Polresta Malang Kota secara online melalui bank BRI serta pemberian batasan pinjaman/kredit dengan sisa gaji tidak boleh kurang dari Rp. 1.000.000;
(aktifitas 3073 / prog 060.01.WA /SP 4/SS3 / IKP 3).
- b) faskes pertama kepada anggota dan keluarga yang sudah mendapat BPJS dan mengajukan ke Faskes ke 2 sebagai tindak lanjutnya serta pelayanan kesehatan yang paripurna kepada anggota Polri, PNS beserta keluarganya.
(aktifitas 3073 / prog 060.01.WA /SP 4/SS3 / IKP 3).
- c) meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani melalui giat kesamaptaan jasmani (TKJ) per semester 1 tahun 2 kali dan binrohtal keagamaan setiap minggu sekali;
(aktifitas 3128 / prog 060.01.BQ /SP 4/SS3 / IKP 3).

6) melaksanakan.....

- 6) melaksanakan rekrutmen anggota Polri dan seleksi Dikbangum serta pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan dengan prinsip “BETAH” berbasis TI;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan kampanye proaktif sepanjang tahun guna mendapatkan calon anggota Polri yang berkualitas;
- b) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;
- c) melaksanakan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) berbasis TI untuk membenahi database SDM Polresta Malang Kota berupa pendataan ulang Polri dan PNS secara elektronik sehingga senantiasa *up to date*;
- d) penguatan jaringan internet secara temporer;
- e) melibatkan LSM dan instansi terkait serta pengawas internal dalam rekrutmen anggota Polri.
(aktifitas 3128 / prog 060.01.BQ /SP 4/SS3 / IKP 3).

- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Pengembangan Almatsus Kepolisian yang modern secara bertahap dan berkelanjutan”**, yaitu:

- 1) mengusulkan pemenuhan kebutuhan perlengkapan Alpalkam dan Almatsus Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi Polresta Malang Kota yang akan dilakukan :

- a) menginventarisir Alpalkam Almatsus Polresta Malang Kota dan Polsek jajaran; (aktifitas 5059/ prog 060.01.BP /SP 5/SS4 / IKP 4).
- b) mengusulkan Renbut alpalkam Almatsus Polresta Malang Kota ke Polda Jatim; (aktifitas 5059 / prog 060.01.BP /SP 5/SS4 / IKP 4).

- 2) peningkatan usia pakai alpalkam/almatsus, ranmor , bangunan dinas Polri dan pembangunan fasilitas perkantoran di Polresta Malang Kota;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi Polresta Malang Kota yang akan dilakukan :

- a) mengusulkan pemenuhan kebutuhan alpalkam / almatsus dan ranmor di Polres Kota Malang Kota antara lain :

- (1) usulan pengadaan kendaraan dinas.
 - (2) usulan pengadaan alat pengolahan data.
(aktifitas 3084 / prog 060.01.BP /SP 5/SS4 / IKP 4).
- b) memelihara dan merawat sarana prasarana kepolisian (alpalkam / almatsus , ranmor dan bangunan) Polresta Malang Kota dan Polsek jajaran. (aktifitas 5059/ prog 060.01.BP/SP 5/SS4 / IKP 4).
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan terpercaya”**, yaitu:
- 1) optimalisasi pengamanan dan pengawasan personel melalui pelaksanaan gaktibplin guna mewujudkan disiplin anggota dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah menciptakan insan Polri dan PNS Polri yang disiplin sehingga terbangun postur pengemban fungsi pelayan masyarakat yang profesional, bermoral, modern dan unggul . Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polresta Malang Kota yang akan dilakukan adalah :
 - a) penegakan tata tertib dan disiplin terhadap anggota Polri / ASN Polresta Malang Kota dan Polsek jajaran yang melanggar melalui giat pembinaan disiplin maupun pelaksanaan sidang disiplin;
(aktifitas 3188,3190,3191/ prog 060.01.WA/SP6/SS 5/IKU7).
 - b) giat pengamanan internal Polri guna minimalisir dan antisipasi adanya pungli yang tidak resmi serta mencegah penyimpangan dalam proses penyidikan maupun pelanggaran disiplin lain yang dilakukan oleh anggota Polri / ASN;
(aktifitas 3189,3190,3191/ prog 060.01.WA/SP6/SS 5/IKU7).
 - c) pertanggungjawaban profesi melalui giat pemeriksaan / pemberkasan pelanggaran Kode Etik Profesi dilanjutkan sidang KKEP dan penegakan hukum anggota Polri / ASN yang melanggar Kode Etik Profesi.
(aktifitas 3190,3191/ prog 060.01.WA/SP6/SS 5/IKU7).
 - 2) melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik rutin maupun insidentil terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan , pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

kebijakan....

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah optimalisasi fungsi pengawasan internal Polri dan strategi pembangunan Polres Kota Malang Kota yang akan dilakukan adalah :

- 1) melaksanakan pengawasan dan monitoring pengaduan masyarakat (dumas) / klarifikasi dumas pada satfung Polresta Malang Kota dan Polsek jajaran;
(aktifitas 3190,3191/ prog 060.01.WA/SP6 /SS 5/IKU7).
 - 2) sosialisasi perundang-undangan, Perkap maupun aturan-aturan yang berlaku di lingkungan Polri, guna meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri / ASN Polresta Malang Kota dan jajarannya .
(aktifitas 3155 / prog 060.01.WA / SP 6/SS 5/ IKP 7).
 - 3) melaksanakan pengawasan dan monitoring kegiatan pelayanan publik/ kinerja dalam rangka mempertahankan predikat WBBM di lingkungan Polres Kota Malang Kotadan Polsek jajaran;
(aktifitas 3189,3190,3191/ prog 060.01.WA/SP6/SS 5/IKU5, 7).
 - 4) mengoptimalkan kegiatan wasops kepolisian baik perencanaan operasi maupun pemantauan setiap pentahapan operasi dan hasil operasi yang dicapai;
(aktifitas 3190,3191/ prog 060.01.WA/SP3/SS 5/IKU7).
 - 5) melaksanakan rapat persiapan wasrik dan pengecekan administrasi yang menjadi obyek wasrik.
(aktifitas 3191/ prog 060.01.WA/SP3/SS 5/IKU7).
- 3) meningkatkan SDM keuangan Polri yang kompetitif:
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi Polresta Malang Kota yang akan dilakukan:
- a) melaksanakan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Polresta Malang Kota secara terencana, berkesinambungan dan secara cermat;
(aktifitas 3073/ prog 060.01.WA/SP6/SS 5/IKU6);
 - b) peningkatan kualitas pemantauan tindak lanjut dari hasil pengendalian dan pengawasan melalui pengimplementasian monitoring dan evaluasi dengan sistem informasi yang terintegrasi.
(aktifitas 3073/ prog 060.01.WA/SP6/SS 5/IKU6).

4) mengoptimalkan.....

4) peningkatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi Polres Kota Malang Kotayang akan dilakukan:

- a) mempersiapkan kelengkapan dan mengikuti pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Srena Polri melalui Indeks Tata Kelola Polri;
(aktifitas 5053/ prog 060.01.WA/SP6/SS 5);
- b) mempertahankan predikat WBK dan WBBM melalui pembuatan /peningkatan inovasi pelayanan publik;
(aktifitas 3128/ prog 060.01.WA/SP6/SS 5/ IKU 5);
- c) asistensi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik serta survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri;
(aktifitas 3128/ prog 060.01.WA/SP6/SS 5/ IKU 5);

IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN (DIPA REFOCUSING)

1. Program dan Kegiatan Polresta Malang Kota TA. 2021

a. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

1) Tujuan:

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c) penindakan tindak pidana umum;
- d) penindakan tindak pidana Narkoba;
- e) penindakan tindak pidana korupsi;
- f) penindakan tindak pidana lalu lintas

b. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri;

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis Sarpras;

c. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;

1) Tujuan:

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi Kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.

2) Kegiatan

2) Kegiatan:

- a) analisis keamanan;
- b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;
- c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;
- d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;
- e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara;
- f) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- g) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;
- h) penyelenggaraan pengamanan objek vital;
- i) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas;
- j) pembinaan potensi keamanan;
- k) pembinaan operasional pemeliharaan keamanan;
- l) pengendalian operasi kepolisian;
- m) pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban.

d. Program Dukungan Manajemen;

1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan:

- a) penerangan masyarakat;
- b) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- c) pertanggungjawaban profesi;
- d) penyelenggaraan pengamanan internal Polri;
- e) penegakan tata tertib dan disiplin Polri;
- f) penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan;
- g) penyusunan dan penyuluhan hukum;
- h) reformasi birokrasi Polri;
- i) manajemen anggaran;

c. Program.....

2. Kebutuhan Anggaran / DIPA REFOCUSING Polresta Malang Kota T.A. 2021

a. kebutuhan anggaran Polresta Malang Kota T.A. 2021 sebesar **Rp. 89.910.038.000,-** (Delapan puluh Sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:

1) rincian kebutuhan anggaran / DIPA Refocusing T.A. 2021 Polresta Malang Kota T.A. 2021 per Jenis Belanja sebagai berikut:

- a) belanja Pegawai : Rp. 66.093.511.000,-
- b) belanja Barang : Rp. 23.816.527.000,-

2) rincian kebutuhan anggaran / DIPA Refocusing T.A. 2021 per sumber anggaran sebagai berikut:

- a) Rupiah Murni : Rp. 84.155.159.000,-
- b) PNBPN : Rp. 5.754.879.000,-

3) rincian kebutuhan anggaran / DIPA Refocusing T.A. 2021 per Program sebagai berikut:

- a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 6.072.251.000,-.
- b) modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp. 5.995.863.000,-
- c) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp. 10.750.952.000,-;
- d) dukungan manajemen Rp. 67.090.972.000,-

b. kegiatan yang berdasarkan rencana kebutuhan anggaran / DIPA Refocusing Polresta Malang Kota T.A. 2021

1) mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, rekrutmen anggota Polres Kota Malang Kota T.A. 2021, usulan kenaikan ini termasuk untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;

2) kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, daya dan jasa serta keperluan perkantoran);

3) kegiatan....

- 3) kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, korupsi, Narkoba perdagangan orang, keamanan dalam negeri, Kamtibmas, kejahatan siber dan penegakan hukum lainnya serta untuk mendukung tercapainya proyek prioritas Nasional Tahun 2021;
- 4) penguatan sarana prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Polri, penanganan gejala sosial, penanganan kasus menonjol, separatisme / KKB, terorisme, berita hoaks dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi;
- 5) melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polri, baik di bidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin profesional modern dan terpercaya;
- 6) meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui strategi Polmas dalam menghadapi ancaman gangguan kamtibmas;
- 7) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas serta di wilayah kota Malang;
- 8) melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polresta Malang Kota serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polri/PNS serta keluarganya;
- 9) mengakomodir Program Prioritas Kapolri, yaitu Transformasi dalam 4 bidang, melaksanakan 16 program dan 51 rencana aksi / kegiatan.

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Resor Kota Malang Kota Tahun 2021, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan Satfung dan Polsek jajaran serta sebagai pedoman pelaksanaan tugas Polres Kota Malang Kota Tahun 2021.

Ditetapkan di : Malang
pada Tanggal : Februari 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG KOTA

Dr. LEONARDUS SIMARMATA, S.Sos., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73050628

REKAP 1 : K/L
RENCANA KERJA KEMENTRIAN/ LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2021

1. KEMENTRIAN/ LEMBAGA

KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG KOTA

2. VISI:

"Terwujudnya keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polresta Malang Kota "

3. MISI:

" Melindungi, mengayomi dan melayani Masyarakat di lingkungan Polresta Malang Kota "

4. PRIORITAS POLRI

KODE	PRIORITAS POLRI	ALOKASI 2021 (RIBU)
60	Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan	0,0
Total		0,0

5. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L

KODE	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS K/L	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
I	Keamanan dan Ketertiban Kota		89.910.038
	Indeks keamanan dan ketertiban Kota	4,35	
01	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		10.750.952
01.01	Indeks Harkamtibmas Polresta Malang Kota	94,01	
02	Penegakan hukum secara berkeadilan		6.072.251
02.01	Indeks penegakan hukum Polresta Malang Kota	78,07	
03	Profesional SDM Polresta Malang Kota		
03.01	Indeks profesionalitas SDM Polresta Malang Kota	3,95	
04	Modernisasi Teknologi Polresta Malang Kota		5.995.863
04.01	Persentase counter opini negatif	78,75%	
05	Sistem Pengawasan Polresta Malang Kota yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani		67.090.972
05.01	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) di Polresta Malang Kota	91,58	
05.02	Nilai Kinerja Anggaran	96,09	
05.03	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	79%	

6. PROGRAM DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
060.01.BI	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	6.036.892	0	0	0	0	0	35.359	0	0	0	6.072.251
060.01.BP	Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri	4.618.516	0	0	0	0	0	1.377.347	0	0	0	5.995.863
	Polri											
060.01.BQ	Program pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	6.408.779	0	0	0	0	0	4.342.173	0	0	0	10.750.952
060.01.WA	Program Dukungan Manajemen	67.090.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.090.972
	Total	84.155.159	0	0	0	0	0	5.754.879	0	0	-	89.910.038

Malang, Februari 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG KOTA

Dr. LEONARDUS SIMARMATA, S.Sos., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73050628

58

82,4

77

71,02

REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN 2021

1 KEMENTERIAN/ LEMBAGA:

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

2 SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG:

05 - Sistem pengawasan Polrestabes Surabaya yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani

3 PROGRAM:

Program Dukungan Manajemen

4 UNIT ORGANISASI (ESELON IB):

Kepolisian Resor Kota Malang Kota

5 PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2021 (RIBU)
	Total	0,0

6 SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2021	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi		67.090.972
01.01	Nilai rata-rata SMK Polresta Malang Kota	1 Layanan	
01.02	Nilai rata-rata PPK PNS Polresta Malang Kota	1 Layanan	
01.03	% Reward bagi personel berprestasi	12 Laporan	
01.04	Persentase Counter Opini Negatif	1 Layanan	
01.05	Nilai Kinerja Anggaran	2 Peraturan	
01.06	% Penanganan pengaduan masyarakat	1 Layanan	
	Total		67.090.972

7 OUTPUT ROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2021 (RIBU)
01	Layanan bidang keuangan Polri, Humas Polri, Teknologi Informasi, Kedokteran dan Kesehatan, Perencanaan Umum dan Anggaran	67.090.972
Total		67.090.972

8 KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGITAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2021										
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN					
3070	Penerangan Masyarakat	123.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.060
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri	66.833.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.833.001
3088	Pertanggungjawaban Profesi	11.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.423
3089	Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri	12.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.392
3090	Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri	13.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.860
3091	Penegakan Tata Tertib dan Disiplin Polri	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
3155	Kerjasama Penyuluhan Hukum	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
5053	Reformasi Birokrasi Polri	36.684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.684
5054	Manajemen Anggaran	10.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.552
Total		67.090.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.090.972

Malang, Februari 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG KOTA

Dr. LEONARDUS SIMARMATA, S.Sos., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73050628

RENCANA KERJA TAHUNAN POLRESTA MALANG KOTA TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS			KET
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
I	Keamanan & Ketertiban Kota Malang	Indeks Keamanan dan Ketertiban Kota Malang	4,35	
1.	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Indeks Harkamtibmas Polresta Malang Kota	94,01	
2.	Penegakan Hukum secara berkeadilan	Indeks Gakkum Polresta Malang Kota	78,07	
3.	Profesionalisme SDM Polresta Malang Kota	Indeks Profesionalitas SDM Polresta Malang Kota	3,95	
4.	Modernisasi Teknologi Polresta Malang Kota	Persentase Counter Opini Negatif	78,75 %	
5.	Sistem Pengawasan Polresta Malang Kota yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani	a. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) di Polresta Malang Kota b. Nilai Kinerja Anggaran c. Persentase Penanganan pengaduan masyarakat	91,58 96,09 79 %	

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal :

Februari 2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA MALANG KOTA

Dr. LEONARDUS SIMARMATA, S.Sos., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 73050628